

# Mimika: Kekayaan Pembawa Petaka<sup>1</sup>

Oleh: Wahyudi Djafar

## Abstract

*With abundant natural resources, the condition can indeed be said Mimika better, compared with other areas in Papua. Human Development Index (HDI) Kabupaten Mimika, including in the secondary category, at 67.99 position in 2008, well above the average of other regions of Papua. But in general area of Papua, Human Development Index (HDI) is still at its lowest of all regions in the republic, even the poorest region of all regions in Indonesia. Become an irony, in a heap of soil richness abundance of hope, but rather the widespread misery going on there. Economic and political domination, and even the exploitation of indigenous peoples, as well as socio-cultural ignorance, and dignity which had never acknowledged, was one factor of inequality. In addition to greedy lust also international corporations, who are reluctant to give welfare of residents in areas that exploit. Oppression and deprivation that occurred a few tens of years, after the presence of PT. Freeport Indonesia, with the support of government officials, mainly military, it can be said to be the main drivers of the growing awareness of the importance of reparations of rights of indigenous people, particularly the land as property. However, the stigma of separatists who are considered against the government, has become a major obstacle in the struggle for the fulfillment and reparations of social and economic rights of citizens Mimika, as part of an Indonesian citizen. While the government, which should be a responsible party, it is often denied the mandate, by not doing what should be their obligation. Confidence in the country become increasingly eroded. Budget and Local Revenue (APBD) number of very fantastic, when compared with other regions in Indonesia, even the majority of allocations are not intended to increase the welfare of the population. The budget allocation for education is up to 20%, while the allocation of health did not even reach 10%, whereas records from BPS Mimika District, amounting to 61.27% of the population suffer from malaria. From the education sector was not encouraging, the average length of the school population only 6.5 years, meaning that the majority of them have only completed elementary school. Referring to Sen, 2000, in Mimika occur due to this situation: First, the absence of adequate economic opportunities for indigenous people, due to land expropriation as a means to their lives; Second, economic oppression, political, and social development occurs on an ongoing basis; Third, the absence of good public service from the state, the government has not fully act as public servants; Fourth, there is often repressive measures against citizens of the state apparatus, where there is demand for the reparations of rights, citizens will be stigmatized as separatists against the government. Paradigm shift, the views and approaches of government, in development in Mimika in particular, and Papua in general, is the only option to change the situation that occurred today. Freedom must be given in full on them, as pre-requisites to reach welfare.*

**Keywords:** *Natural Resources, Exploitation, Domination, The abandonment of Dignity, Social Economic Rights, Reparations of Rights, Obligations of State, Welfare.*

---

<sup>1</sup> Hak Cetak Monograph ini ada pada Center for Democracy and Human Rights Studies (Demos), Jakarta.

## Pengantar: Kepiluan di Tengah Pesta<sup>2</sup>

*“Orang Amungme-Kamoro sebenarnya tak pernah merasa miskin, karena tanpa kerja pun mereka masih bisa hidup, dengan sekedarnya memanfaatkan yang disediakan oleh alam, dan itu cukup bagi mereka”.*

[Mgr. John Philip Saklil Pr., Uskup Timika]

Kemeriahan pesta di tengah belantara Papua, mungkin menjadi ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kehadiran kota Timika. Kekayaan sumberdaya yang terpendam dalam wilayah ini telah menyemarakkan pesta ribuan orang dari beragam negara, untuk berebut rente di tengah rimba, dengan ancaman malaria ganas. Komunitas-komunitas buruh pertambangan yang hadir bersamaan dengan pembukaan pertambangan raksasa PT. Freeport Indonesia, telah membidani lahirnya kota Timika, dari yang semula sekedar rimba penuh malaria. Dengan latar demikian, tidak salah jika orang kemudian menyebut kota Timika, sebagai ‘kota buruh’, atau Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika, Luther Bonggoibo, menyebutnya sebagai ‘kota karyawan’. Sebutan itu menjadi simplifikasi yang tepat untuk menggambarkan situasi dan pola kehidupan di kota Timika, yang penuh intrik dan persaingan. Keserakahan Freeport untuk mengeruk habis gundukan gunung-gunung emas, telah menihilkan nasib dan hak-hak warga asli (*indigenous people*), pemilik sah tanah Mimika, selama puluhan tahun lamanya. Akibatnya, Mimika terlambat memikirkan masa depannya.

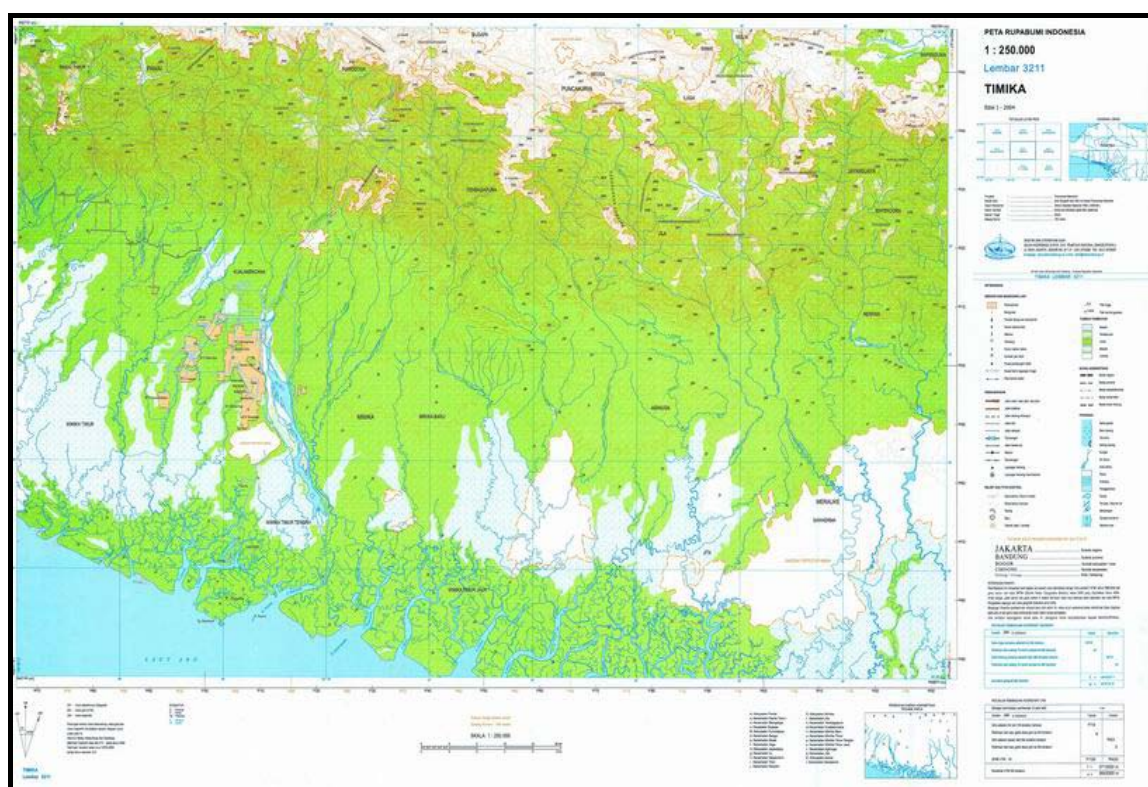
Timika, adalah cikal bakal lahirnya Kabupaten Mimika, kota buruh pertambangan yang terletak antara lautan Arafuru dengan Pegunungan Tengah, di sisi barat daya Papua. Semula, Timika merupakan bagian dari Kabupaten Fak-Fak, yang ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Administratif Mimika, sesuai Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1996. Situasi berubah sesaat setelah Tim 100 menemui Presiden Habibie, pada 26 Februari 1999. Tim ini secara resmi meminta kemerdekaan bagi Provinsi Irian Jaya dari wilayah Indonesia. Menyikapi gugatan cerai dari Papua, tanpa berpidato, Presiden Habibie hanya menyampaikan, “pelajari dan renungkan lah kembali tuntutan itu setelah kembali ke Papua”. Tanpa meminta persetujuan rakyat Papua, respon berikutnya dari pemerintah republik adalah mengeluarkan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, pada 4 Oktober 1999.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Tulisan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan dari Tjahjono E.P, dan Markus Markur, dua orang jurnalis untuk media nasional di Mimika, yang setia mengantarkan penulis menemui informan-informan penelitian ini, termasuk menyalurkan penulis dari kecurigaan para telik sandi (mereka yang selamanya tak pernah merasa tentram). Serta bersedia berdiskusi bermalam-malam untuk membicarakan temuan-temuan di lapangan. Untuk itu, penulis maupun Demos, mengucapkan terima kasih kepada dua orang di atas.

<sup>3</sup> Terhitung semenjak 1 Januari 2000 nama ‘Irian Jaya’ berubah menjadi ‘Papua’. Perubahan ini dicetuskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yang lebih mengedepankan pendekatan akomodatif dalam menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Atas nama pemerintah republik, Presiden Wahid juga secara resmi dan terbuka meminta maaf kepada warga Papua, yang menjadi korban pelanggaran HAM oleh TNI, di masa lalu. Tindakan berani dilakukan Presiden Wahid, dengan merestui penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua, pada 29 Mei-3 Juni 2000, serta membolehkan pengibaran bendera ‘Bintang Kejora’ berdampingan dengan bendera ‘Merah Putih’. Menurut Gus Dur, pengibaran bendera ‘Bintang Kejora’ hanyalah sekedar ekspresi kultural dari warga Papua, jauh dari perwujudan nasionalisme dan keinginan untuk memerdekakan diri dari republik. Lihat: *Papua Dalam Konflik Berkepanjangan: Mencari Akar Penyelesaian Masalah Konflik Papua*, (Jakarta: Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Januari 2004). Lihat juga George Junus Aditjondro, *Cahaya Bintang Kejora*, (Jakarta: ELSAM, 2000).

Pemerintah bertindak cepat, sehari setelahnya, pemerintahan Habibie langsung menunjuk orang-orang sebagai penguasa daerah-daerah baru tersebut. Strategi politik Jakarta ini kontan mendapat penolakan massif dari warga Papua, karena dianggap sebagai upaya pemecah belah perjuangan orang Papua, dan tidak sesuai permintaan dari Tim 100. Pada akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Perkara No. 018/PUU-I/2003. Putusan ini salah satunya dilandasi oleh sejumlah kontradiksi dan inkonsistensi antara UU No. 45 Tahun 1999, dengan UU No. 5 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang lahir kemudian.<sup>4</sup>

### Peta Rupa Bumi Kabupaten Mimika



**Sumber:** Peta Rupa Bumi Indonesia 3211, Bakosurtanal, 2010.

Meski dibatalkan, undang-undang tersebut berhasil membentuk Provinsi Irian Jaya Barat, dan menaikkan status sejumlah kabupaten administratif menjadi kabupaten otonom. Sedangkan Provinsi Irian Jaya Tengah, yang seharusnya menaungi sejumlah kabupaten otonom baru tersebut—wilayah di sekitaran Pegunungan Tengah—gagal terbentuk. Namun demikian, hingga saat ini, sejumlah kelompok masih mengusahakan berdirinya Provinsi Papua Tengah. Kendati dibungkus dengan alasan pemerataan pembangunan dan ekonomi, usaha untuk membentuk Provinsi Papua Tengah, menyengat dengan bau amis bagi-bagi kekuasaan dan pertimbangan sumberdaya, yang memang menumpuk di wilayah ini. Kebijakan pemekaran ini telah memicu perang suku (*tribal war*) berkepanjangan di wilayah Mimika, Pada bulan Agustus 2003, terjadi kerusuhan antara mereka yang mendukung dan mereka yang menentang provinsi baru,

<sup>4</sup> Winarno Yudho, dkk., *Aspek Sosio Yuridis dan Politik Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan MK*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK dan Konrad Adenauer Stiftung, 2006).

dimana tujuh orang tewas dalam peristiwa tersebut. Untuk mengenang peristiwa itu kemudian diabadikan dengan sebuah monumen perdamaian di tengah Kota Timika, yang menandai berakhirnya peperangan tersebut.

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999, Kabupaten Mimika ditetapkan dengan luas wilayah 19.592 km<sup>2</sup>, atau 4,75% dari seluruh wilayah Provinsi Papua, yang terdiri dari 12 – dua belas distrik (kecamatan), 6 kelurahan, dan 79 kampung – level pemerintahan setingkat desa. Secara geografis wilayah ini di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya, bagian selatan Laut Arafuru, sebelah timur Kabupaten Merauke, dan sebelah baratnya kabupaten induk, Fakfak. Topografi wilayah berupa gunung-gunung dan dataran rendah.<sup>5</sup>

Hingga tahun 2008 jumlah penduduk Mimika sebesar 187.751 jiwa, dengan luas wilayah 19.592 km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan (Kota Timika), dan wilayah-wilayah pertambangan yang dikelola PT. Freeport Indonesia (Kuala Kencana dan Tembagapura). Sedangkan wilayah-wilayah lain, yang memiliki kontur berbukit-bukit, hanya didiami oleh segelintir penduduk asli, yang kehidupannya jauh dari memadai, karena sulitnya akses transportasi. Wilayah-wilayah pegunungan dan terpencil lainnya hanya bisa dicapai dengan pesawat terbang, karena belum adanya jaringan jalan yang memadai. Kepadatan penduduk hanya 9,58, artinya dalam setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah di Mimika, rata-rata hanya dihuni oleh 9 orang.<sup>6</sup>

Tabel 1: **Komposisi Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Distrik**

No.	Distrik	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Mimika Barat	2.914	4.213
2	Mimika Barat Tengah	2.356	2.555
3	Mimika Barat Jauh	2.868	2.082
4	Mimika Timur	1.789	8.831
5	Mimika Tengah	726	3.228
6	Mimika Timur Jauh	1.049	3.960
7	Mimika Baru	2.216	110.014
8	Kuala Kencana	511	25.310
9	Tembaagapura	1.280	20.697
10	Agimuga	1.772	701
11	Jila	1.097	4.496
12	Jita	1.014	1.664
<b>Jumlah</b>		<b>19.592</b>	<b>187.751</b>

**Sumber:** Mimika Dalam Angka 2009, BPS Kabupaten Mimika.

Menurut pengakuan warga asli, penduduk Mimika adalah mereka yang berasal dari dua suku asli, dan lima suku kekerabatan. Suku asli terdiri dari orang Amungme – Amungkal yang mendiami wilayah pegunungan, dan orang Kamoro di wilayah pantai. Sedangkan lima suku kekerabatan terdiri dari Suku Dani (Lani), Suku Damal, Suku Mee,

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/w/index.php?oldid=2892141>.

<sup>6</sup> Kabupaten Mimika Dalam Angka 2009.

Suku Nduga, dan Suku Moni, yang semula bertempat tinggal di perbatasan kedua suku asli. Namun saat ini, komposisi penduduk Mimika tidak hanya ketujuh suku tersebut, lebih beragam lagi, orang-orang pendatang dari Maluku (khususnya Kepulauan Key – orang Key dianggap sebagai pembawa peradaban, yang pertama kali di wilayah Mimika),<sup>7</sup> Bugis yang komposisinya sudah mencapai 10,8% dari jumlah penduduk, dan bahkan 15,2% penduduk Mimika diisi orang Jawa. Selain itu, sejumlah pendatang dari Eropa, Amerika, serta Australia, juga telah membanjiri wilayah perkotaan dan pertambangan di Mimika, sebagai pekerja di PT. Freeport.

Pada mulanya, seluruh wilayah Mimika adalah wilayah ulayat dari Suku Kamoro, suku yang mendiami pesisir barat daya Papua. Namun semenjak pembukaan pertambangan PT. Freeport Indonesia, pada tahun 1967, Suku Amungme yang mendiami wilayah pegunungan—bumi Amungsa, dipaksa untuk berpindah ke dataran rendah Suku Kamoro. Sementara wilayah ulayat Suku Amungme, sebagai sumber cadangan emas, tembaga, dan logam-logam lainnya, dijadikan wilayah-wilayah konsesi pertambangan, yang selanjutnya akan dibuka sebagai lokasi pertambangan oleh PT. Freeport Indonesia. Lambat laun, seiring dengan berkembangnya pertambangan PT. Freeport Indonesia, sejumlah suku Pegunungan Tengah (lima suku kekerabatan), turut serta bermigrasi ke wilayah ulayat Suku Kamoro.<sup>8</sup> Akibat proses ini, seperti pada wilayah Papua lainnya, menurut Theo Van Den Broek, di wilayah ini telah terjadi dominasi ekonomi dan politik, dan bahkan eksploitasi terhadap penduduk asli. Dan yang kedua mereka terabaikan secara sosial-budaya, serta martabat yang tak pernah diakui.<sup>9</sup>

Dari beberapa indikator, dengan sumberdaya yang berlimpah, kondisi Kabupaten Mimika memang dapat dikatakan lebih baik, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Papua. Di wilayah Papua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika, termasuk dalam kategori menengah atas, pada posisi 67,99 pada tahun 2008. Namun secara umum wilayah Papua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada posisi terendah dari seluruh wilayah di republik ini.<sup>10</sup> Hal itu tentu menjadi

<sup>7</sup> Pada mulanya orang-orang Kei banyak dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda, untuk menempati posisi-posisi kunci dalam pemerintahan lokal, selain juga orang Ambon dan Manado.

<sup>8</sup> Menurut pengakuan sejumlah informan, watak Suku Kamoro yang enggan untuk berkonflik dengan suku-suku lain di Papua, dan cara hidup mereka yang lebih menyukai mencukupi kebutuhan dengan mencari ikan di sungai dan laut, berburu, dan meramu sagu, menjadi salah satu faktor suksesnya migrasi suku-suku pegunungan tengah ke wilayah ulayat Suku Kamoro. Termasuk ketika mereka ditekan oleh pemerintah Indonesia dan PT. Freeport untuk melepaskan tanah-tanah ulayatnya, mereka lebih mudah memberikan pernyataan persetujuan, bila dibandingkan dengan tetangganya, Suku Amungme. Pdt. Matheus Adadikam menuturkan bahwa prinsip orang Kamoro, adalah tidak mau berkonflik dengan orang lain, menurut mereka Mimika mau dibangun sampai ke langit silakan, asal jangan ganggu kami orang Kamoro. "*Lihat saja tanah dari mil 50 sampai di pantai, adalah milik orang Kamoro, dan berapa banyak orang kamoro yang menjual tanah, yang menjual tanah justru orang Makasar, orang Jawa, orang Ambon, dan orang yang tidak punya tanah lainnya, dijual di depan orang Kamoro, dan mereka diam saja*", tutur Adadikam. Akibat migrasi suku-suku Pegunungan Tengah, wilayah-wilayah pertemuan antara lima suku kekerabatan, menjadi wilayah dengan potensi konflik yang laten. Di wilayah ini seringkali meletup konflik dengan beragam sebab dan alasan, khususnya konflik yang didesain oleh pelaku-pelaku kekuasaan, seperti wilayah Kwamki Lama, yang hampir setiap minggu terjadi konflik. Satu hal yang menarik saat ini, adalah ketika Pasar Lama Timika, dipindahkan ke Pasar Baru Timika, sejumlah orang Kamoro menduduki lahan bekas pasar lama, yang diklaim sebagai tanah ulayat mereka. Orang Kamoro menuntut ganti rugi atas pemakaian tanah tersebut, dan mereka akan mempertahankannya, dari rencana pemerintah yang kabarnya akan menggunakan lahan bekas pasar tersebut, untuk pembangunan pusat perbelanjaan.

<sup>9</sup> Theo Van Den Broek, Aspek-Aspek Sosial di Papua, dalam Theodor Rathgeber (ed), *Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya di Papua Barat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hal. 240.

<sup>10</sup> Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 08/01/94/Th. IV, 4 Januari 2010. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan tiga komponen dasar pembangunan manusia, yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent living*). Tiga komponen dasar tersebut kemudian diterjemahkan dalam 4 indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek

sebuah ironi, dalam timbunan kelimpahan kekayaan tanah pengharapan. Bahkan bilamana dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita—dengan penopang terbesar dari sektor pertambangan, wilayah ini berada pada urutan ke-5 tertinggi setelah Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Riau.<sup>11</sup>

Sedangkan Upah Minimum Propinsi (UMP) di tahun 2010, mencapai Rp 1.326.500,00, di atas UMP DKI Jakarta.<sup>12</sup> Angka kemiskinan, menurut data resmi pemerintah, pada tahun 2008 mencapai 26,63%, menurun bila dibandingkan tahun 2004, yang mencapai 38,8%. Angka tersebut juga jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keseluruhan wilayah Papua, di mana angka kemiskinannya mencapai 37,08% dari total seluruh penduduk.<sup>13</sup> Secara umum, kabupaten ini menggantungkan ekonominya pada pertambangan tembaga dan emas yang dikelola PT. Freeport Indonesia, sektor-sektor pendukung seperti perikanan, pertanian dan industri, sekedar mengikuti laju dari pertambangan.

PT. Freeport Indonesia (PT. FI)—awalnya bernama PT. Freeport Indonesia Incorporated (PT. FII), mulai beroperasi di tanah Papua pada Maret 1967, pasca-ditandatanganinya kontrak karya untuk jangka waktu 30 tahun. Kontrak karya lahir segera setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pada Januari 1967. Sesuatu hal yang menimbulkan pertanyaan besar, dikarenakan belum jelasnya status hukum wilayah Papua di kala itu. Tahun 1967 status hukum Papua masih berada dibawah kendali UNTEA—lembaga PBB yang disertai mandat untuk menjalankan pemerintahan transisi di Papua, pasca-penyerahan teritori dari pemerintah Kerajaan Belanda, sebagai hasil dari Perjanjian New York. UNTEA juga sekaligus bertugas mempersiapkan penyelenggaraan plebisit total (*Act of Free Choice*)—pemerintah Indonesia sering menyebutnya dengan istilah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), untuk menentukan pilihan rakyat setempat, apakah hendak berintegrasi dengan Indonesia, atau mendirikan pemerintahan sendiri. Plebisit total tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 1969, dua tahun setelah penandatanganan kontrak karya.<sup>14</sup>

Langkah pemerintah Indonesia yang mengambil tindakan sepihak atas tanah Papua, mendapat serangkaian kecaman. Perilaku tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak fair, mengingat pada saat itu belum ada kejelasan status wilayah Papua. Di Jakarta pun muncul kecurigaan, bahwa lahirnya UU Penanaman Modal Asing, yang menjadi produk pertama pemerintahan Orde Baru, setelah berhasil merebut kursi kekuasaan, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memfasilitasi masuknya Freeport ke tanah Papua. Kecurigaan tersebut dilatarbelakangi keinginan Freeport, yang memang sudah sejak lama menginginkan untuk melakukan eksplorasi di tanah Papua. Selain itu, bagi pemerintah republik pemberian kontrak karya pada Freeport yang notabene adalah perusahaan Amerika Serikat, adalah satu upaya untuk mendapatkan dukungan dari

---

huruf, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran riil penduduk. Secara nasional, peringkat IPM Provinsi Papua jauh tertinggal dibandingkan provinsi lainnya, provinsi ini masuk dalam kategori menengah bawah, pada posisi 64,00, pada tahun 2008. Secara nasional hanya ada dua provinsi di Indonesia, yang indeks pembangunan manusianya, masuk dalam katagori menengah bawah, yaitu Provinsi NTB dan Provinsi Papua.

<sup>11</sup> Laporan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Provinsi Papua, 2009.

<sup>12</sup> Surat Keputusan Gubernur Papua No. 195 Tahun 2009.

<sup>13</sup> Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 07/01/94/Th. IV, 4 Januari 2010.

<sup>14</sup> Dianto Bachriadi, *Merana Di Tengah Kelimpahan*, (Jakarta: ELSAM, 1998), hal. 132-133. Lebih lanjut baca juga John Saltford, *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962–1969: The anatomy of betrayal*, (New York: Routledge Curzon, 2003).

pemerintah Amerika, dalam plebisit total penentuan status wilayah Papua.<sup>15</sup> Soeharto, pemimpin tertinggi rezim Orde Baru, pada 3 Maret 1973, pun memberikan pernyataan yang setengah membenarkan sinyalemen di atas. Dikatakan Soeharto, bahwa Freeport adalah pelopor bagi penanaman modal asing di Indonesia.<sup>16</sup>

Berdasarkan kontrak karya tahun 1967, PT. Freeport Indonesia memegang konsesi pertambangan atas wilayah Pegunungan Jayawijaya Selatan (*Erstberg*), dan sekitarnya, yang kesemuanya adalah wilayah ulayat Suku Amungme. Kemudian untuk mendukung aktivitas perusahaan, PT. Freeport Indonesia juga membutuhkan sejumlah lahan di dataran rendah guna membangun infrastruktur perusahaan, termasuk perumahan karyawan, bandara, dan pelabuhan laut, yang artinya juga akan memakan wilayah ulayat Suku Kamoro di dataran rendah. Semenjak itulah penindasan dan perampasan hak-hak kedua suku dimulai, baik oleh PT. Freeport Indonesia secara langsung, maupun melalui pemerintah Indonesia, dengan seluruh aparat pendukungnya, khususnya militer.<sup>17</sup> Warga ditekan dan diintimidasi untuk menyerahkan tanah-tanah adat mereka, untuk pembangunan sarana-prasarana perusahaan, beberapa diantaranya diusir dari wilayah tempat tinggalnya. Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport memanfaatkan konflik ulayat antara orang Amungme dan Kamoro, untuk merebut tanah-tanah yang disengketakan antar kedua suku.<sup>18</sup> Aparat pemerintah menekan tokoh-tokoh adat salah satu suku, untuk menandatangani –cap jempol, surat pernyataan pelepasan tanah-tanah ulayat, tanpa perlu adanya ganti kerugian, bila suku yang lain menolak, akan dilakukan tindakan intimidasi dan diberikan tekanan-tekanan, hingga misi mereka berhasil.

Serangkaian tindakan perlawanan yang dilakukan warga, dengan berbekal busur dan panah, serta semangat untuk mempertahankan tanah leluhur –ibu orang Amungme, dijawab pemerintah dengan operasi bersenjata dari tentara nasional. Puluhan orang mati, dibunuh oleh aparat pemerintahnya sendiri, demi sebuah upaya menjaga tradisi dan kehormatan budaya serta nilai-nilai, yang dikandung dalam sebuah benda bernama ‘tanah’. Amarah orang amungme membuncah, melihat ‘ibu’ mereka dijarah, dirampas, dan diinjak-injak tanpa hormat, diri mereka sebagai manusia seperti tak ada harganya lagi, di mata pemerintah dan arogansi industrialisasi yang bersembunyi di balik semangat modernitas, dengan janji kemajuan.<sup>19</sup> Seperti umumnya masyarakat di wilayah Indonesia lainnya, ketika Orde Baru berkuasa, warga yang melawan, dituduh sebagai penghambat pembangunan, dan bagian dari gerakan pengacau keamanan

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*, (Jakarta: ELSAM, 2003), hal. 31.

<sup>17</sup> Akibat eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, kehormatan dan tradisi kedua suku diinjak-injak dan tidak diakui eksistensinya. Menurut orang Amungme, tanah itu ibarat ‘ibu’ yang wajib dihormati dan dimuliakan, karena telah memberi hidup pada mereka. Dalam budaya mereka, wilayah ulayat dibagi ke dalam empat kategori, yang membentuk satu kesatuan budaya. Pertama, adalah wilayah pegunungan atau puncak-puncak gunung, tempat bersemayam arwah nenek moyang Suku Amungme (Jomun-Nerek), yang dipersonifikasikan sebagai ‘kepala ibu’; Kedua, adalah lubang-lubang batu-batuan gunung yang memancarkan air, ibarat ‘air mata kasih sayang ibu’, yang terus menjadi mata air bagi kehidupan anak-anaknya; Ketiga, ialah wilayah lembah, tempat yang subur dan aman sebagai permukiman dan perkebunan orang Amungme, wilayah ini, bak susu, jantung, dan bahu dari ibu Suku Amungme, yang tiada lelah menopang hidup anak-anaknya; Keempat, wilayah pantai, yang diibaratkan bagian tubuh perempuan dari perut hingga ujung kaki. Senafas dengan orang Amungme, orang Kamoro pun demikian, percaya bahwa tanah mereka adalah ibu, tempat bergantung dan sumber penghidupan mereka, yang menjadi basis sosial budaya orang Kamoro. Sedangkan PT. Freeport Indonesia, datang dengan penuh arogansi, tanpa sepele kata izin, tiba-tiba menginjak-injak ibu orang Amungme dan orang Kamoro. Lihat: Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*, (Jakarta: ELSAM, 2003), hal. 14-30.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Dianto Bachriadi, *Op. Cit.*, hal. 145-156.

yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Stigmatisasi OPM menjadi stempel bagi pemerintah Indonesia dan aparat keamanan untuk melakukan tindakan kekerasan, terhadap warga yang menolak hadirnya PT. Freeport di tanah mereka.<sup>20</sup>

Perlawanan terhadap kehadiran Freeport dan militer di tanah Papua berlangsung tiada henti. Sejalan dengan itu bentuk-bentuk tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang dilakukan oleh aparat keamanan pun selalu menyertai. Perlawanan tidak hanya dilakukan oleh warga lokal, tetapi melibatkan pula sejumlah organisasi non-pemerintah di Jakarta, yang juga membangun jejaring dengan dunia internasional, untuk memberikan tekanan massif kepada Freeport. Hingga pada tahun 1996, *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC), mencabut asuransi politik PT. Freeport Indonesia sebesar US\$ 100 juta, dengan alasan telah terjadi serangkaian pelanggaran lingkungan dan sosial atas aktivitas yang dilakukan oleh PT. Freeport. Berbarengan dengan itu, pada medio pertama 1996, sejumlah aksi besar juga digalang warga Suku Amungme, di Timika. Sejumlah fasilitas perusahaan dirusak warga, mereka menuntut untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi Freeport, Mr. James R. Moffet.

Akibat aksi-aksi tersebut, aktivitas PT. Freeport sempat mandeg selama empat hari lamanya. Pada saat yang bersamaan, orang Amungme melalui lembaga adatnya, Lemasa, dengan didampingi sejumlah NGO, juga melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan *class action* terhadap Freeport McMoRan Copper and Gold Inc, sebagai induk PT. Freeport Indonesia, di Louisiana, Amerika Serikat. Gugatan tersebut diajukan atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia terhadap Suku Amungme, selama beroperasi di bumi Amunsa. Akibat serangkaian peristiwa tersebut, PT. Freeport Indonesia mendapat sorotan tajam, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.<sup>21</sup>

Menyikapi rentetan tuntutan tersebut, manajemen Freeport pada akhirnya mau berunding dengan warga. Ketika bertemu beberapa perwakilan warga Timika di Tembagapura, James R. Moffet, berjanji akan mempertimbangkan semua tuntutan warga. Pada kesempatan tersebut, Moffet juga melontarkan pernyataan, bahwa Freeport akan menggelontorkan 1% keuntungan kotoranya, untuk suku-suku di sekitar wilayah pertambangan PT. Freeport. Dana sebesar kurang lebih US\$ 15 juta tersebut akan diberikan selama 10 tahun, dengan besaran yang mengikuti fluktuasi keuntungan PT. Freeport Indonesia. Dana tersebut dikenalkan Freeport sebagai 'dana kemitraan' (*trust fund*), yang ditegaskan bahwa itu diberikan sebagai dana pembangunan, yang tidak ada kaitannya dengan pengakuan atas tanah ulayat atau rekognisi, dan bukan merupakan kompensasi atas segala tindakan perusakan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang terjadi sebelumnya. Masyarakat setempat kemudian mengenal dana tersebut dengan peristilahan 'dana satu persen'.<sup>22</sup>

Selanjutnya dana satu persen dibagikan kepada Pemda Papua, dengan total dana 34,5 milyar rupiah, alokasi pembagiannya setiap suku di sekitar wilayah kontrak karya

<sup>20</sup> Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah peninggalan dari proses integrasi Papua dengan Indonesia, melalui mekanisme Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang dituding dilakukan dengan tidak fair, penuh intimidasi dan ancaman. OPM berdiri tahun 1964, setahun setelah penyerahan teritori Papua, dari Kerajaan Belanda kepada PBB, kelompok ini menginginkan Papua Barat tumbuh menjadi negara sendiri yang merdeka. Lihat: Jhon RG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, (Jakarta: Grasindo, 1993).

<sup>21</sup> Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Op. Cit.*, hal. 117-118.

<sup>22</sup> *Ibid.*



Freeport (dua suku asli dan lima suku kekerabatan) akan mendapatkan 500 juta rupiah, sedangkan sisanya, sebesar 31 milyar rupiah, akan diserahkan pada Pemda Papua, melalui program Pengemangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2). Meski beberapa suku, melalui ketua-ketua sukunya menerima pemberian dana tersebut, namun Suku Amungme melalui Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA), menolak pemberian dana tersebut, dengan alasan bahwa dana kemitraan tidak menyelesaikan akar persoalan yang dialami warga.

Dana Kemitraan tidak menjawab tuntutan Suku Amungme yang ingin diakui eksistensi dan integritasnya, menurut LEMASA, pemberian dana tersebut adalah upaya Freeport untuk menjegal gugatan Suku Amungme terhadap Freeport McMoRan di pengadilan negara bagian Louisiana, dan terakhir pembagian dana tersebut merupakan strategi Freeport untuk memecah-belah suku-suku yang ada di sekitar kontrak karya.<sup>23</sup> Namun, PT. Freeport dengan menggunakan tangan pemerintah republik, dan aparat militernya, terus-menerus melakukan tekanan dan intimidasi terhadap warga untuk menerima dana yang dikucurkan secara sepihak tersebut.

### **Mengawetkan Objek, Kebijakan Tanpa Partisipasi**

Warga di tanah Papua nampaknya memang tak pernah diakui eksistensinya. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang diharapkan menjadi penentu masa depan dan nasib orang Papua, ditengarai penuh dengan kecurangan dan tekanan. Peningkaran terhadap orang Papua lagi-lagi terjadi ketika PT. Freeport hendak membuka pertambangan di tanah mereka. Freeport tak pernah meminta izin dalam mengeksplorasi tanah-tanah ulayat mereka, harga diri dan kehormatan orang Amungme dan Kamoro diinjak-injak, akibat kebijak sepihak dari Jakarta, yang seperti menjual hak-hak kepemilikan orang-orang Papua pada PT. Freeport Indonesia.

Tidak hanya berhenti di situ, perjuangan panjang orang Amungme dan Kamoro, serta warga asli lainnya, atas tindakan sewenang-wenang Freeport dan aparat militer Indonesia, tidak segera direspon pemerintah Jakarta, untuk secepatnya memperbaiki dan mengubah pendekatan dalam pengambilan kebijakan di tanah Papua. Ide pemberian dana kemitraan (*trust fund*) yang digagas Moffet, hanya dikonsultasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemda Papua–Irian Jaya waktu itu, pejabat-pejabat Freeport, dan petinggi militer, tanpa pernah melibatkan warga Mimika. Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus (KOPASUS) TNI Angkatan Darat, Prabowo Subiyanto, yang tidak jelas unsur mewakili kepentingan siapa, justru dilibatkan dalam pertemuan konsultasi tersebut. Dari pertemuan konsultasi tersebut, akhirnya Bappenas memutuskan untuk memasukkan dana satu persen ke dalam proyek PWT2, yang sudah dirancang pemerintah pusat. Proyek ini dikelola langsung oleh pejabat Provinsi Papua, dan Freeport menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas penggunaan seluruh dana hibah tersebut.<sup>24</sup>

Tanpa ada penjelasan, perincian, atau bahkan sosialisasi–penyuluhan dalam bahasa Orde Baru –sekali pun, mengenai pelaksanaan program Pengembangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2), masyarakat dipaksa untuk menerima program tersebut, meski tak tahu arah dan tujuan program. Proyek Pengemangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2),

<sup>23</sup> Dianto Bachriadi, *Op. Cit.*, hal. 159-160.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Op. Cit.*

sebenarnya muncul untuk menyikapi memburuknya pemberitaan internasional atas situasi di Mimika, terutama terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia, hak ulayat atas tanah, kerusakan lingkungan, dan kerawanan sosial, yang diakibatkan oleh hadirnya PT. Freeport Indonesia di tanah Papua. Proyek ini menjadi semacam jalan pintas untuk menyelesaikan serangkaian permasalahan yang melingkupi kehadiran Freeport dan tindakan brutal aparat militer Indonesia. Pendekatan *top down* selalu diterapkan Jakarta, dalam pengambilan kebijakan di tanah Papua, masyarakat tak dianggap, mereka sekedar menjadi objek, yang harus selalu tunduk patuh terhadap semua kebijakan yang diterapkan negara. Seperti program pengembangan wilayah terpadu ini, yang dijalankan dengan tergesa, serta nihil partisipasi dari tokoh-tokoh lokal dan gereja. Beragam kebijakan yang berkaitan dan menyangkut diri orang Papua, selalu ditentukan oleh orang luar, keluh orang Papua.<sup>25</sup>

Hadirnya PW2T yang tidak menyelesaikan akar dari keseluruhan permasalahan yang berkecamuk di Mimika, memecahbelah suku, baik di dalam internal suku maupun antara suku satu dengan suku lainnya, juga menimbulkan serangkaian persoalan turunan. Dalam pengelolaan dana PW2T, suku-suku yang hendak mengakses atau menggunakan dana yang disediakan PW2T, terlebih dahulu harus mengorganisir dalam bentuk badan hukum sejenis yayasan. Yayasan-yayasan yang mewakili dua suku asli dan lima suku kekerabatan tersebut, selanjutnya diharuskan membuat proposal untuk diajukan pada PW2T, guna mendapatkan dana kemitraan. PW2T kemudian akan menyeleksi proposal-proposal yayasan yang masuk, setelah proposal terseleksi baru PW2T akan mengajukan permohonan pendanaan pada manajemen PT. Freeport, melalui *Freeport Fund for Irian Jaya Development (FFIJD)*.<sup>26</sup>

Mekanisme tersebut sekaligus menganulir pernyataan petinggi Freeport sebelumnya, yang mengatakan hendak menggelontorkan mentah-mentah dana satu persen keuntungan kotor Freeport, pada warga asli dan pemerintah daerah. Pada kenyataannya, dana tersebut tetap dikelola di Freeport, dan hanya dikucurkan ketika ada pengajuan proposal dari PW2T, sehingga setiap tahun jika dihitung dana yang dikucurkan tidak pernah mencapai satu persen dari keuntungan Freeport. Sejumlah informan lokal pun mengaku tak pernah tahu berapa besar keuntungan Freeport setiap tahunnya. Gregorius Okaore, salah seorang tokoh masyarakat Suku Kamoro menyatakan, “kalau pun setiap tahun kami dibohongi Freeport, kami pun tak tahu, karena kami tak pernah tahu berapa besar keuntungan Freeport setiap tahunnya. Masyarakat sudah dibodohi duluan dengan nominal uang yang sangat banyak, milyaran, angka yang masyarakat tak pernah dengar sebelumnya”.<sup>27</sup>

Akibat pola pengelolaan dana yang demikian, masyarakat tak pernah tahu penggunaan dana satu persen, untuk kegiatan dan diarahkan ke dalam program apa saja, dan siapa sasarannya. Berapa persen dari dana satu persen yang telah dipakai pun tidak diketahui. Persoalan kian memburuk, akibat perilaku purba manusia, korupsi. Pengelolaan dana satu persen, yang mengharuskan didirikannya suatu yayasan untuk mewakili tiap-tiap suku, telah melahirkan elit baru dari setiap suku. Elit-elit baru yang tidak ditopang oleh pendidikan memadai, berakibat pada pengelolaan dana yang amburadul. Penggunaan dana tidak tepat sasaran, dan tidak diketahui untuk apa penggunaan dana tersebut.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Wawancara dengan Gregorius Okaore, Tokoh masyarakat Suku Kamoro.

Pada akhirnya, masyarakat berani menuntut pertanggungjawaban atas centang-perenang penggunaan dana satu persen tersebut. Sejumlah pengurus yayasan bahkan diminta untuk menyerahkan seluruh uang yang pernah mereka terima kepada masyarakat, secara tunai, karena dana-dana dimaksud dianggap tidak jelas penggunaannya dan tidak tepat sasaran. Parahnya, demi mendapatkan dana kemitraan, di Mimika tumbuh yayasan-yayasan liar, yang mengatasnamakan suku-suku tertentu. Perilaku-perilaku semacam itu, yang membuat konflik warga asli kian memanas, situasi masyarakat kian tegang, karena tidak adanya sikap saling percaya satu sama lain.<sup>28</sup>

Imbas lebih buruk dari digulirkannya dana satu persen adalah berubahnya sikap dan pola hidup masyarakat, dari yang semula sangat bergantung dengan alam, menjadi sangat bergantung pada uang. Mengetahui begitu banyaknya uang yang dikucurkan Freeport melalui dana kemitraan, masyarakat lebih mengutamakan dan menekankan pembuatan proposal untuk diajukan pada yayasan, guna mencukupi kebutuhan keuangan mereka. Tradisi bercocok tanam, berburu, dan meramu sagu, lambat laun mereka tinggalkan, masyarakat makin malas untuk mengolah dan memanfaatkan alamnya, mereka menjadi sangat bergantung dan mengandalkan belas kasihan Freeport. Meski sebenarnya, penyebab utama dan pertama mereka meninggalkan tradisi lama mereka, adalah karena tanah-tanah mereka, yang seharusnya digunakan untuk bercocok tanam, direbut oleh PT. Freeport, sementara sungai dan pantai tempat mencari ikan, dipenuhi oleh tailing dan limbah dari produksi PT. Freeport Indonesia.

Akibat perputaran uang yang begitu besar, masyarakat pun hanya mengetahui uang-uang dengan nominal yang besar, sehingga setiap kali terjadi perselisihan antar kelompok atau suku, mereka selalu mematok biaya ganti rugi di atas satu milyar, atau sedikitnya ratusan juta rupiah. “Padahal mereka sebenarnya tak tahu, seberapa banyak uang satu milyar itu, tapi gara-gara Freeport mengucurkan uang dengan nilai milyaran, yang mereka lihat sangat banyak, setiap negosiasi bila terjadi perselisihan, mereka selalu meminta tebusan dengan nilai milyar”, papar Alfian Kartono, kontributor sebuah stasiun televisi nasional yang sudah lama bermukim di Timika.<sup>29</sup>

Tabel 2: Evolusi Pola Hidup Warga Asli Mimika

Pra-dana Kemitraan		Pasca-dana Kemitraan (Juni 1996)
Suku Kamoro	Suku Amungme	
Mencari ikan di sungai-sungai, dan di laut, serta meramu sagu yang banyak terdapat di dataran rendah. Hidup bergantung pada sungai, sampan, dan sagu (3S).	Bercocok tanam secara tradisional, dengan menanam umbi-umbian, dan berternak babi, serta berburu. Intinya hidup mereka bergantung pada tani, dan ternak (2T).	dari pada bertani, beternak, mencari ikan, dan berpangkur sagu, mereka lebih mengandalkan ‘proposal’ untuk mendapatkan dana satu persen, guna mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka.

**Sumber:** diformulasikan dari keterangan sejumlah informan.

Perilaku pemerintah daerah pun tak kalah buruk, setelah adanya dana satu persen. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat atas mekanisme penggunaan dana tersebut. Banyak proyek-proyek pemerintah yang telah dikerjakan sebelumnya, yang

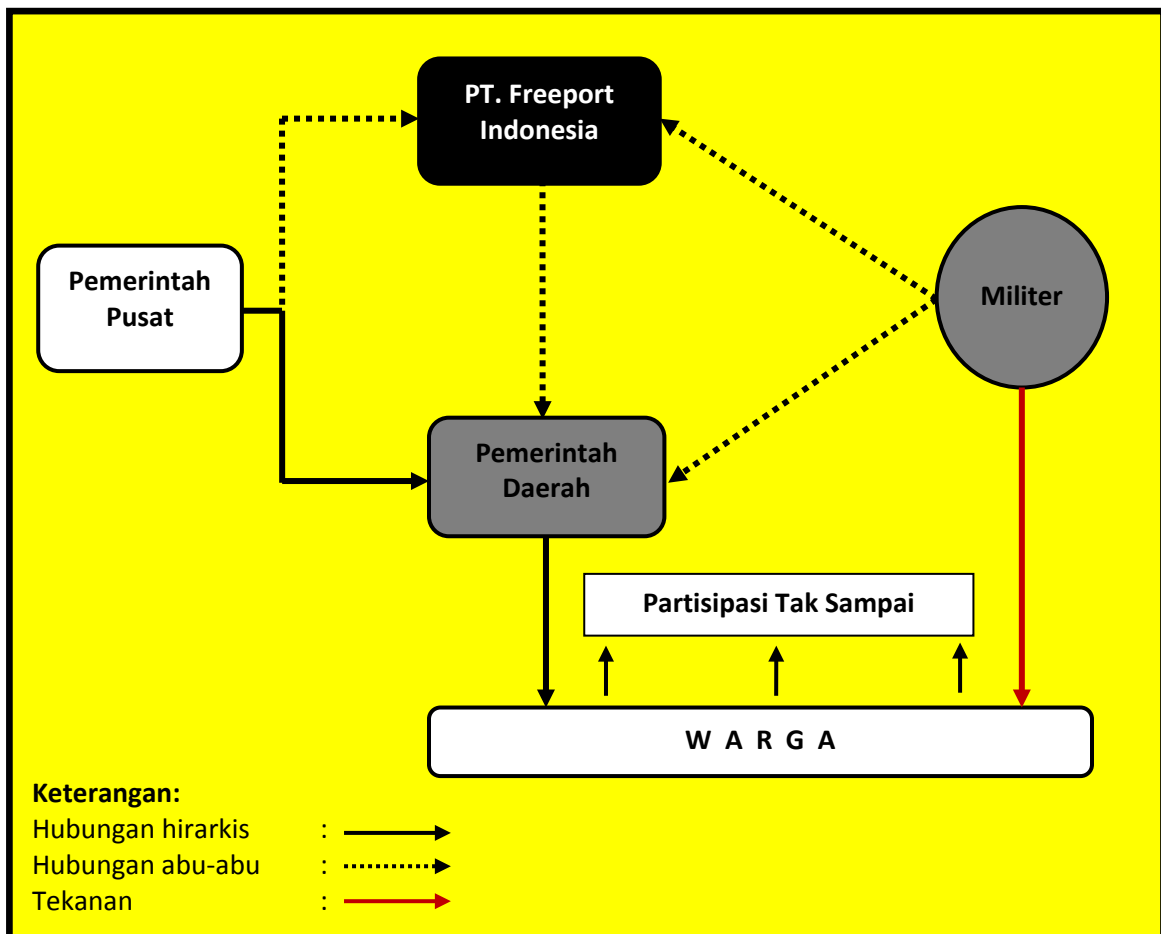
<sup>28</sup> Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Op. Cit.*

<sup>29</sup> Wawancara dengan Alfian Kartono, Kontributor Media Group di Timika.

seharusnya dibiayai dengan anggaran APBD dan APBN, kemudian diadakan kembali dengan menggunakan dana satu persen, yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Hadirnya dana satu persen, mengakibatkan tumpang tindih penganggaran pada proyek-proyek pemerintah, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, menjadi benteng bagi pemerintah, untuk memanfaatkan semanya dana-dana yang tersedia. Sementara masyarakat tak punya akses untuk membuka itu semua. Itu mungkin alasan pemerintah, untuk memaksakan pengucuran dana satu persen, meskipun ada penolakan, dan masyarakat masih bertanya-tanya mengenai mekanisme dan tujuan dari program tersebut.<sup>30</sup>

Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, situasi di Mimika pun tak banyak berubah. Wilayah ini hanya berubah status pemerintahan, dari yang semula Kabupaten Administratif menjadi kabupaten otonom. Kendati kursi-kursi pemerintahan diduduki warga-warga lokal, namun pada kenyataannya keberpihakan terhadap warga pribumi, tidak membaik. Keberadaan PT. Freeport Indonesia dan aparat militer yang masih terus mencengkram kuat di wilayah ini tetapi menjadi momok, yang menyulitkan adanya perubahan signifikan. Kebijakan-kebijakan pemerintahan masih menggunakan pola-pola lama, yang cenderung *top down* dan menihilkan partisipasi.

Bagan 1: Pola Kebijakan Top Down di Mimika



<sup>30</sup> Wawancara dengan Allo Raфра, Ketua Komisi A DPRD Mimika, yang juga mantan Plt. Bupati Mimika.

Salah satu bentuk kebijakan pasca-Orde Baru yang dianggap sangat bersifat *top down*, adalah hadirnya program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK). Program ini digulirkan oleh pemerintah provinsi, ketika awal gubernur Barnabas Suebu berkuasa. Kebijakan pembangunan pada pemerintahan Barnabas Suebu ini hendak menekankan pada kampung sebagai basis pembangunannya. Tiga pendekatan penting dalam program RESPEK adalah adanya keberpihakan, pemberdayaan, dan kemandirian. Langkah tersebut diambil oleh pemerintahan Suebu, dikarena orang Papua asli yang secara kualitas sumberdaya manusianya masih tertinggal, dianggap tidak mampu untuk bersaing secara terbuka dengan orang pendatang, sehingga memerlukan suatu tindakan afirmasi. Bentuk afirmasi diberikan dengan pemberian block grant sebesar 100 juta rupiah setiap kampung di Papua. Selanjutnya, menurut kerangka program yang dibuat, penggunaan dana tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni harus adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.<sup>31</sup>

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak sesuai apa yang dipersyaratkan di dalam kerangka program RESPEK. Program yang digulirkan terutama untuk pemberdayaan ekonomi ini orang asli Papua ini, justru jauh dari bau pemberdayaan. Allo Rafa, anggota DPR Kabupaten Mimika mengungkapkan, “bolelah program itu terlihat bagus, dan memiliki pendanaan yang besar, tetapi kalau tidak ada juklak – pentunjuk pelaksanaan, juknis – petunjuk teknis – nya apa bisa berjalan. Sampai sekarang program itu tidak ada juklak-juknisnya, tetapi uang sudah dikucurkan”. Seperti periode-periode sebelumnya, ketika warga masih bertanya-tanya tentang maksud dan tujuan dari program tersebut, tiba-tiba pemerintah sudah menggelontorkan dana, padahal masyarakat belum memiliki perencanaan pembangunan yang jelas.

Akibatnya, dana RESPEK yang seharusnya digunakan untuk program pemberdayaan, malah digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Bahkan di beberapa kampung, dana tersebut dibagi-bagikan secara tunai kepada masing-masing kepala keluarga.<sup>32</sup> Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Matheus Adadikam, Pendeta GKI Klasis Mimika, menurutnya penggunaan dana-dana Otsus – otonomi khusus, yang diwujudkan dalam program RESPEK, tidak digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, dikarenakan perangkat-perangkat di bawah belum dibangun, uang sudah digulirkan terlebih dahulu.

Kecenderungan lain adalah, masyarakat seringkali membuat program-program yang seharusnya menjadi kerja-kerja pemerintah, yang anggarannya sudah dialokasikan di APBD. Masyarakat seperti mengambil alih kewajiban pemerintah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, malah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik yang seharusnya menjadi tugas pemerintah. “Sudah sering saya katakan pada masyarakat, jangan membuat program yang seharusnya menjadi program pemerintah, kalau mereka melakukan itu, justru mereka mengambil alih kewajiban pemerintah, janganlah mereka kerjakan apa yang harus dibiayai negara, kalau itu diambil alih, lalu anggaran pemerintah untuk apa?” lanjut Adadikam.

<sup>31</sup> Muridan S. Widjojo, dkk., *Papua Road Map: Negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future*, (Jakarta: LIPI, YOI, dan Yayasan TIFA, 2009), hal. 128-129.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Allo Rafa.

Kesal dengan sikap pemerintah yang tak kunjung berubah, Thomas Wanmang, salah seorang tokoh masyarakat Amungme menegaskan, “pokoknya kalau semua program pemerintah orientasinya masih dari proyek ke proyek, nasib orang Papua tidak akan berubah. Pemerintah cuma buang-buang uang saja, masyarakat tidak pernah diberdayakan”. Ungkapan yang sama juga disampaikan, Uskup Timika, Mgr. John Philip Saklil Pr, menurutnya selama ini setiap program yang digulirkan pemerintah, logikanya semua masih proyek, tidak menyerap kebutuhan masyarakat yang senyatanya. Program-program pemerintah sifatnya masih karitatif semua, tidak ada yang memiliki nalar pemberdayaan. **“Kesannya hanya menghabiskan-habiskan uang semata, dan masyarakat pun sudah paham, program pemerintah ya sekedar proyek”**, ujar Uskup.

Khusus untuk wilayah Mimika, selain mendapatkan dana RESPEK dari pemerintah provinsi, setiap kampung juga mendapatkan dana pemerintah kabupaten, melalui program ‘Eme Neme Yaware’, yang besarnya juga 100 juta rupiah. Belum lagi dana kemitraan yang digulirkan Freeport melalui LPMK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Amungme Kamoro), yang juga sebesar 100 juta rupiah setiap kampung di Mimika, khusus untuk kampung dua suku asli dan lima kekerabatan suku. Nasib dana-dana tersebut pun sama, tak jelas penggunaannya. Wanmang menggugat, “orang Jakarta bilang, “orang Papua itu bodok, banyak uang tapi tetap miskin”, iya orang Jakarta kasih terus minum mabuk, orang Papua mabuk terus, tidak diberdayakan bagaimana menggunakan uang yang benar”.<sup>33</sup>

Ketika diklarifikasi ke DPRD, Allo Rafra membenarkan kondisi tersebut. Memang benar diadakan Musrembang, tetapi di dalam Musrembang tidak pernah ada usulan dari bawah, dari kampung. Musrembang hanya menjadi sesuatu hal yang seolah-olah sudah rutin, sehingga tidak ada ekspresi dari bawah yang benar-benar naik. Pembangunan semuanya bersifat *top down*, tidak ada yang *bottom up*. Tidak pernah ada pikiran bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat, karena pemerintahan sendiri seperti sudah tidak ada.

### **Kelimpahan Tanpa Akses, Apatisme Warga Terhadap Hak**

*“... ini sudah berlangsung lama, jadi masyarakat sudah apatis, ada yang meminta haknya dipenuhi tapi tak pernah diberi”.*

**[A.Allo Rafra, mantan Plt. Bupati Mimika]**

Berpuluh tahun lamanya orang Mimika hidup menderita, penuh dengan kesengsaraan yang memilukan, akibat keserakahan kapitalisme internasional, yang mewujud dalam PT. Freeport Indonesia, dan tindakan-tindakan brutal mesin-mesin perang republik, Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tanah yang menjadi instrumen utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*), direbut, dikuasi, dan eksploitasi oleh Freeport sedemikian massif, dengan bantuan tentara sebagai anjing penjaganya. Selain itu, Freeport juga telah mendistorsi nilai tanah, sebagaimana dimaknai orang Mimika. Bagi orang Mimika, tanah tidak hanya sebatas benda bernilai ekonomis semata, tetapi di

<sup>33</sup> Wawancara dengan Thomas Wanmang.

dalamnya juga terdapat unsur-unsur religi, budaya, dan politik. Kehormatan dan harga diri orang Mimika diinjak-injak Freeport dan pemerintah Indonesia. Tindakan arogan Freeport tidak sekedar menimbulkan kerugian materil, dengan hilangnya tanah-tanah warga pribumi, tetapi juga menimbulkan kerugian imateril yang luar biasa, atas budaya dan adat-istiadat penduduk asli.

Jangankan ada penggantian atas perampasan hak yang dilakukan perusahaan, meminta izin pada warga setempat, ketika hendak melakukan eksplorasi pun tidak. Eksistensi warga asli sebagai manusia dan pemegang ulayat, seperti tak ada arti dan harganya di mata Freeport. Tekanan yang terus-menerus dan rendahnya tingkat pendidikan membuat warga tidak memahami sepenuhnya posisinya sebagai warga, dan arti penting negara dalam memenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai warga. Situasi tersebut diperburuk dengan kondisi politik setempat, yang kurang memberikan ruang bagi partisipasi, dan miskin memberikan informasi pada warga.

Pola-pola pemerintahan Orde Baru, yang memanfaatkan kekuatan militer dan kejelian telik sandi, masih berlaku di wilayah ini. Masyarakat tak berani bicara bebas, karena selalu berada di bawah bayang-bayang dan ancaman represifitas aparat. Hal serupa pun terjadi pada aktor-aktor politik, mereka tidak ada keberanian untuk bicara fakta, dan memberikan kritik secara langsung pada pelaku kekuasaan. Tapi Allo Raфра menampilkan itu, menurut dia orang tak berani bicara, mungkin karena tak mengerti dan memahami persoalan, jadi memilih diam. Namun, ketika dikejar dengan pertanyaan lebih jauh, mengenai sengkabut persoalan di Mimika, politisi PDIP ini pun tiba-tiba menahan penuturannya, “jangan berbicara di sini, mas – peneliti. Di sini tembok punya telinga, angin punya mata, lebih baik berbicara di tempat lain”.

Persoalan ekonomi sesungguhnya menjadi problem utama bagi masyarakat Mimika. Meski tanah mereka kaya akan sumberdaya, tetapi mereka tak punya akses di bumi sendiri. Seluruh sumberdaya dibawa lari keluar Mimika, Thomas Wanmang berseloroh, **“emas, tembaga, semuanya dibawa lari keluar oleh Freeport, orang Papua cuma dapat lumpur dan batunya saja”**. Periode 1967-1996 adalah masa terburuk bagi warga Mimika, khususnya bagi orang Amungme dan orang Kamoro, dimana tanah mereka dirampas, martabat dan harga diri diinjak-injak, dan mendapat intimidasi, serta tindakan kekerasan dari aparat militer secara terus-menerus. Kondisi mulai membaik setelah adanya dana kemitraan di tahun 1996, meskipun pada mulanya masyarakat Amungme-Kamoro menolak dana tersebut. Setidaknya, setelah adanya dana kemitraan, ada pendanaan yang keluar dari Freeport untuk masyarakat, dari yang sebelumnya tidak ada sama sekali.

Awalnya, pengelolaan dana tersebut dimonopoli oleh pemerintah, melalui program PW2T, dan masyarakat hanya bisa mengaksesnya melalui institusi-institusi berbadan hukum, yang dianggap mewakili suku-suku di Mimika. Akan tetapi, buruknya pengelolaan dana oleh pemerintah, menjadikan penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran, tidak memberdayakan warga Mimika, namun justru digunakan untuk pembangunan infrastruktur semata, yang seharusnya dibiayai anggaran negara. Selain itu, banyaknya institusi-institusi liar yang mengatasnamakan suku tertentu, demi mendapatkan uang dari Freeport, juga kian memperuncam persoalan. Imbasnya, setelah berakhirnya Orde Baru pada 1998, program PW2T akhirnya diubah pengelolaannya, tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Atas prakarsa Lembaga Masyarakat Adat Suku

Amungme (LEMASA) dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (LEMASKO), kemudian dibentuk sebuah lembaga baru, yang mewadahi unsur-unsur masyarakat adat, pemerintah, dan PT. Freeport Indonesia. Lembaga baru ini dinamakan sebagai Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPMI), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme-Kamoro (LPMK).

LPMK bermisi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro, serta lima kekerabatan suku yang ada di Mimika. Sumber pendanaan dari LPMK berasal dari dana satu persen yang digulirkan Freeport sejak tahun 1996 hingga tahun 2006. Setiap tahunnya, LPMK sedikitnya menganggarkan dana 200 milyar rupiah untuk program pengembangan masyarakat di Mimika.<sup>34</sup> Sehar-harinya, LPMK dikelola oleh suatu badan musyawarah yang terdiri dari perwakilan Pemda Mimika, perwakilan dari Suku Amungme dan Suku Kamoro, perwakilan gereja di Mimika, serta *Vice President Director* PT. Freeport Indonesia. LPMK memiliki tiga program pengembangan utama, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi.

Namun begitu, Allo Raфра menuturkan, meski program-program pengembangan yang sudah dilakukan LPMK patut diapresiasi, akan tetapi selama masih ada Freeport di dalam tubuh LPMK, masyarakat tetap tidak akan berdaya. Ditegaskan Raфра, **“Freeport itu tidak pernah memberikan laporan secara terbuka pada pemerintah kabupaten, berapa hasil yang ditambang, berapa keuntungan yang diperoleh. Freeport ini negara dalam negara, mereka merasa tak punya kewajiban untuk melaporkan kegiatannya pada pemerintah daerah. Selama dua tahun jadi pejabat bupati, saya tak pernah dapat laporan dari Freeport”**. Diceritakannya, rakyat tidak pernah merasa sejahtera dengan kehadiran Freeport, mereka memahami bahwa hak-hak mereka diambil, tetapi karena keluguan mereka, akhirnya menerima begitu saja, segala tingkah polah Freeport. Termasuk keberadaan wakil presiden direktur Freeport di dalam LPMK, yang sesungguhnya tidak ada relasinya dengan kelembagaan LPMK.

Lebih lanjut dijelaskan Raфра, keseluruhan dana LPMK sebenarnya adalah milik masyarakat, yang sudah dihibahkan Freeport seluruhnya, sejak tahun 1996 hingga tahun 2006. Lucunya, untuk menurunkan dana-dana tersebut, guna pelaksanaan program-programnya, LPMK harus mendapatkan persetujuan dari Freeport. Artinya, bilamana Freeport tidak menyetujui program yang hendak digulirkan, maka dana milik masyarakat tersebut pun tak dapat diakses. Sehingga, selama Freeport masih campur tangan dalam kelembagaan dan mekanisme pendanaan LPMK, masa depan orang Mimika akan tetap dikendalikan oleh Freeport.<sup>35</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Gregorius Okoare, salah seorang tokoh masyarakat Kamoro, yang juga difasilitasi oleh LPMK, semenjak sekolah, hingga sekarang mendirikan sebuah badan usaha, berupa penanaman di lahan tailing Freeport. Dijelaskannya, meskipun Freeport membantu dalam proses usahanya, tetapi secara umum seperti Freeport tidak rela, ketika warga asli Mimika hendak maju secara ekonomi. Kelas pengusaha sulit ditemukan di Mimika, karena ruang yang disediakan Freeport tidak memadai. Tjahjono, Jurnasil pada sebuah media nasional, menceritakan hal serupa, **“sebenarnya banyak pengusaha-pengusaha lokal yang sebenarnya bisa**

<sup>34</sup> Murdjan S. Widjojo, Dkk., *Op. Cit.*, hal. 76.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Allo Raфра.



maju, dengan asistensi dari LPMK, akan tetapi ketika mereka sudah mendekati kelas menengah pengusaha, dan mulai bisa menghidupi kelompok warga lainnya, tiba-tiba program asistensi dihentikan sepihak oleh Freeport, dengan tidak lagi menyetujui anggaran yang diajukan LPMK".<sup>36</sup>

Pengalaman serupa juga dialami oleh Thomas Wanmang. Sebagai salah seorang tokoh masyarakat Amungme, Thomas Wanmang mendirikan sebuah koperasi untuk menampung hasil-hasil pertanian dari mama-mama Suku Amungme. Kemudian untuk menyalurkan komoditas-komoditas pertanian tersebut, Thomas Wanmang membuat memorandum of understanding (MoU) dengan Freeport, untuk menerima komoditas-komoditas tersebut, guna mencukupi kebutuhan pangan pekerja-pekerja Freeport yang jumlahnya puluhan ribu. Gampangnya, koperasi yang didirikan Wanmang dengan beberapa tokoh Amungme, menjadi pemasok bagi pemenuhan kebutuhan pangan pekerja-pekerja Freeport.

Pada mulanya kerjasaman ini berjalan bagus, hingga makin banyak petani-petani Amungme yang memasok hasil pertanian ke koperasi. Namun, setelah berlangsung beberapa tahun, tiba-tiba Freeport membuat ulah dengan menunda pembayaran atas komoditas yang dipasok ke Freeport. Akibatnya koperasi tidak bisa membayar komoditas-komoditas tersebut kepada petani. Wanmang mencurigai, tindakan tersebut adalah upaya Freeport untuk mematikan koperasi yang sudah tumbuh baik. Parahnya kemudian, secara sepihak Freeport memutuskan MoU dengan koperasi, dan mengalihkan kerjasaman pasokan pangan dengan sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan Media Group, PT. Pangan Sari.<sup>37</sup>

Kota yang didirikan oleh para pekerja ini, nampaknya justru meng-alienasi warga-warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan. PT. Freeport sendiri, yang terang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya, yang asal-muasalnya adalah milik warga asli, senyatanya juga kurang memberikan kesempatan bagi warga asli, untuk masuk ke dalam Freeport sebagai pekerjanya. Kualitas sumberdaya manusia, selalu menjadi alasan utama bagi Freeport untuk menampik masuknya warga-warga lokal. Menurut data resmi Freeport, dari 20.600 orang yang bekerja untuk Freeport, jumlah warga asli hanya sekitar 3.040 orang (14,75%). Menurut Freeport jumlah tersebut sudah signifikan, bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, seperti pada tahun 1996, dimana jumlah pekerja lokal hanya 600 orang.<sup>38</sup>

Minimnya serapan tenaga kerja oleh Freeport memunculkan banyak persoalan bagi warga lokal. Selain persoalan ekonomi, dampak sosial yang diakibatkan juga kian mengkhawatirkan. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika, menyebutkan angka pencari kerja yang terdaftar di tahun 2008, tercatat sebanyak 23.882 orang, sedangkan serapannya hanya 390 orang. Para pencari kerja tersebut, sebagian besar diantaranya adalah lulusan SMA, persentasenya mencapai 31% dari total pencari kerja.<sup>39</sup> Dampak sosial dari rendahnya serapan tenaga kerja, dicontohkan Thomas Wanmang dalam cuplikan berikut, "**generasi muda Mimika, mahasiswa sekali pun, bukannya pegang**

<sup>36</sup> Wawancara dengan Tjahjono E.P.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Thomas Wanmang.

<sup>38</sup> Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan, PT. Freeport Indonesia, tahun 2007.

<sup>39</sup> Kabupetan Mimika Dalam Angka 2009.

**pena, tetapi malah pegang botol minum mabuk di pinggir jalan, ini akibat mereka tidak diberi kesempatan, pemerintah menelantarkannya”.**

Dampak sosial paling terasa belakangan ini adalah konflik berkepanjangan kampung Kwamki Lama yang tak segera bisa diselesaikan. Menurut sejumlah informan, konflik di wilayah ini sesungguhnya dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan kecil, namun dikarenakan mayoritas warga menganggur, akibat diusir dari tempat-tempat pendulangan emas, mereka menjadi mudah untuk disulut konflik dan terus-menerus berkelahi.<sup>40</sup> Salah seorang tokoh Kwamki Lama menyatakan, “ini persoalan kecil, tetapi karena pemerintah bodok, mereka tidak mampu menyelesaikannya, mana janji-janji bupati, pemerintah, yang akan membawa program-program untuk kami, memajukan kami, beri kami pekerjaan agar tidak berkelahi terus. Coba lihat di luar Timika, tidak ada yang berkelahi seperti ini, tapi karena pemerintah bodok, kami berkelahi”.<sup>41</sup>

Luther Bonggoibo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, pun mengakui jika angka pengangguran di Mimika cukup tinggi, menurutnya itu terjadi karena makin banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah Mimika, dengan harapan bisa diterima bekerja di Freeport. Untuk memecahkan persoalan minimnya serapan lapangan pekerjaan bagi warga lokal, Bonggoibo mengaku telah memberikan himbauan pada perusahaan-perusahaan di Mimika untuk lebih mengutamakan putra-putra daerah dalam penerimaan tenaga kerja. Selain itu, Pemda bekerjasama dengan LPMAK, dan PT. Freeport juga telah mendirikan Institute Pertambangan Nemangkawi, dalam upaya memperbanyak jumlah tenaga kerja lokal di dalam PT. Freeport.

Sayangnya, program-program untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga asli khususnya, tidak ditopang dengan anggaran yang memadai. Anggaran untuk bidang ketenagakerjaan hanya Rp 5.454.250.000,00 atau sekitar 0,39% dari total APBD Mimika, yang mencapai 1,4 trilyun rupiah. Parahnya, dari temuan Demos diketahui dari total anggaran tersebut, 84% diantaranya atau Rp 4.581.450.000,00 justru digunakan untuk belanja aparat. Sedangkan yang dialokasikan untuk belanja publik hanya sekitar Rp 872.750.000,00 hanya 16% saja dari total anggaran bidang ketenagakerjaan.

**Tabel 2: Alokasi Anggaran Ketenagakerjaan Kab. Mimika 2010**

Alokasi Anggaran	Versi Pemda	Presentase	Versi Demos	Presentase
<b>Belanja Aparat</b>	2.920.250.000	53,54%	4.581.450.000	84%
<b>Belanja Publik</b>	2.533.950.000	46,46%	872.750.000	16%
<b>Total</b>	<b>5.454.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.454.200.000</b>	<b>100%</b>

**Sumber:** APBD Kabupaten Mimika 2010.

“Seharusnya pemerintah memperbanyak fasilitas-fasilitas produksi, bukan memberikan uang terus-menerus. Diberikan uang kalau tidak memiliki ketrampilan, hanya akan dihabiskan untuk konsumsi”, gugat Uskup Timika. Akibat pola-pola yang salah dalam

<sup>40</sup> Kwamki Lama dihuni oleh penduduk dari sejumlah suku, khususnya lima kekerabatan suku, yang berasal dari pegunungan tengah. Artinya tempat ini menjadi pertemuan dari beragam suku. Sebagian dari penduduk di sini, turun dari pegunungan tengah untuk mendulang emas, di limbah-limbah Freeport. Namun belakangan mereka diusir dari tempat pendulangan, sehingga tidak lagi memiliki pencaharian.

<sup>41</sup> Pernyataan diperoleh dari rekaman yang didapat oleh Alfian Kartono, ketika meliput situasi konflik di Kwamki Lama.

pengembangan masyarakat, mereka menjadi kian menggantungkan hidup pada 'proposal', alias mengajukan bantuan pendanaan pada LPMK khususnya. Sumberdaya yang tersedia sebenarnya tidak kurang, namun karena masyarakat tidak disediakan akses yang cukup untuk mengembangkan sumberdaya tersebut, akhirnya sumberdaya yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat. "Seperti di pantai-pantai, seharusnya pemerintah membangun koperasi, untuk menampung pasokan ikan dari nelayan Kamoro, tidak hanya memberikan bantuan uang. Memang pemerintah tidak memiliki program pemberdayaan yang berkesinambungan, semuanya pendekatannya proyek, sehingga setelah proyek berakhir, berakhir pula mata pencaharian masyarakat", lanjut Uskup.

Situasi lain yang cukup memprihatinkan di Kabupaten Mimika, adalah terkait kondisi pendidikan dan kesehatan warga. Meskipun dana yang bergulir cukup banyak, namun penyediaan layanan kurang bisa diakses dan dinikmati oleh warga. Faktor geografis dan kontur wilayah, dianggap oleh dinas terkait sebagai faktor utama buruknya layanan pendidikan dan kesehatan. Selama ini, khususnya warga dua suku asli, dan lima kekerabatan suku, justru lebih mengandalkan layanan yang disediakan melalui dana-dana kemitraan yang dikelola oleh LPMK, daripada layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah. Diakui Ignatius Adi, sesungguhnya buruknya situasi kesehatan dan pendidikan dipengaruhi karena ketidakmampuan ekonomi, akibat tidak adanya ruang yang cukup bagi warga untuk melakukan pengembangan ekonomi, termasuk memiliki mata pencaharian yang tetap.

Khusus mengenai pemenuhan layanan kesehatan, minimnya warga yang memanfaatkan layanan kesehatan dari pemerintah dapat dilihat dari data Susenas tahun 2006. Data tersebut menunjukkan bahwa 71,19% penduduk yang menderita sakit, lebih memilih melakukan pengobatan sendiri secara mandiri, sedangkan yang memanfaatkan layanan kesehatan hanya 39,02%. Dari jumlah tersebut, hanya 7,32% yang menggunakan jasa rumah sakit pemerintah, sedangkan sisanya berobat pada rumah sakit swasta yang dibiayai dana kemitraan, dan juga Puskesmas.

Nur Fitriyah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menyatakan, minimnya masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan, dikarenakan susah akses untuk mencapai tempat-tempat layanan kesehatan. "Biaya operasional kesehatan di Mimika, paling banyak digunakan untuk biaya transportasi, karena untuk datang ke Puskesmas, kadang harus menggunakan pesawat terbang, jadi masyarakat lebih baik mengobati sakitnya sendiri", ungkapnya. Untuk menyalahi hal itu, menurut dia Pemda tengah berupaya untuk memperbanyak jumlah puskesmas pembantu (Pustu), tapi lagi-lagi bermasalah, karena jarang tenaga medis yang mau ditempatkan yang lokasi sangat jauh di pegunungan atau lembah.

Dijelaskan Nur Fitriyah, pemerintah telah memiliki beberapa skema pendanaan yang dikucurkan untuk pembiayaan operasional kesehatan masyarakat. Selain Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diberikan pemerintah pusat, ada juga Jamkespa (Jaminan Kesehatan Papua) yang digulirkan pemerintah provinsi Papua, khusus untuk pengobatan-pengobatan rujukan, yang mengharuskan pengobatan ke luar daerah. Ada juga dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten.

Kendati banyak sumber-sumber pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah, untuk biaya operasional kesehatan masyarakat, tetapi program-program tersebut tak pernah diketahui masyarakat. Gregorius Okoare mengungkapkan, pemerintah tak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya Jamkesmas, sehingga masyarakat tidak pernah mengurusnya. Masyarakat tetap mengandalkan rumah sakit yang operasionalnya dibiayai dengan dana kemitraan. Yang patut disayangkan menurut Okoare, rumah sakit-rumah sakit itu mematok harga tinggi ketika masyarakat berobat, harga obat di atas harga di pasaran, “mentang-mentang biayanya diklaim ke Freeport, mereka kasih harga mahal sekali” ungkapnya. Sementara di Puskesmas, malah masih ditemukan obat-obat kadaluwarsa, yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan.

Tabel 3: Alokasi Anggaran Kesehatan Kab. Mimika 2010

Alokasi Anggaran	Versi Pemda	Presentase	Versi Demos	Presentase
Belanja Aparat	32.732.207.304	59,30%	46.388.777.304	84,05%
Belanja Publik	22.461.149.500	40,70%	8.804.579.500	15,95%
<b>Total</b>	<b>55.193.356.804</b>	<b>100%</b>	<b>55.193.356.804</b>	<b>100%</b>

Sumber: APBD Kabupaten Mimika 2010.

Dari alokasi anggaran yang disediakan untuk bidang kesehatan pada APBD Kab. Mimika pun tidak begitu menggembirakan, dari total 1,4 trilyun rupiah APBD Kab. Mimika tahun 2010, hanya 9,24% atau sebesar Rp 55.193.356.804,00 yang dialokasikan untuk bidang kesehatan. Kondisi itu diperparah dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk belanja-belanja publik—kepentingan warga. Analisis Demos menunjukkan hanya 15,95% anggaran kesehatan yang digulirkan untuk belanja publik, sedangkan anggaran belanja pegawai mencapai 84,05%.

Buruknya kondisi kesehatan juga terlihat dari banyaknya penderita malaria di wilayah Mimika. Hingga tahun 2008, data Dinas Kesehatan yang diolah oleh BPS Mimika, menunjukkan jumlah penderita malaria mencapai 115.040 jiwa, dari 187.752 jiwa penduduk Mimika. Artinya 61,3% penduduk Mimika terserang malaria.

Tabel 4: Jumlah Penderita Malaria di Mimika

No.	Jenis Malaria	Tahun (jumlah penderita)			
		2005	2006	2007	2008
1	Malaria Tropika	11.219	7.037	12.210	18.687
2	Malaria Tertiana	9.919	6.454	11.174	13.764
3	Malaria Mix	12.856	10.523	521	1.672
4	Malaria Klinis	-	-	12.937	80.917
<b>Jumlah</b>		<b>33.994</b>	<b>24.014</b>	<b>36.842</b>	<b>115.040</b>

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2009.

Selain malaria, penyakit lain yang menjadi momok warga Mimika adalah *tuberculosis* (TBC), dan HIV/AIDS. Hingga 31 Maret 2010, data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa kurang lebih 2,4% warga Mimika terkena penyakit HIV/AIDS, dan kesemuanya adalah

warga asli, “*pola hidup memberi pengaruh dalam peningkatan penderita HIV/AIDS*”, ungkap Saiful Taqin, Kepala P4PL Dinas Kesehatan. Hingga tahun 2008, tercatat 2.555 orang di Mimika positif terinfeksi HIV, sementara jumlah penderita AIDS mencapai 460 orang.

Tabel 5: Jumlah Penderita HIV/AIDS 2000-2008

Tahun	Penderita	
	HIV	AIDS
2000	30	7
2001	70	15
2002	92	19
2003	189	27
2004	222	9
2005	252	7
2006	199	37
2007	186	91
2008	1.315	248
<b>Jumlah</b>	<b>2.555</b>	<b>460</b>

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2009.

Pendeta Matheus Adadikam mengkritik situasi ini, menurutnya ada masalah dengan pendekatan yang digunakan dalam layanan kesehatan selama ini, dilihat dari lambatnya perbaikan kondisi kesehatan warga Mimika, “dahulu ketika Belanda meninggalkan Papua, angka malaria turun, angka lepra turun. Tetapi apa yang terjadi ketika Indonesia masuk, malaria meningkat, TBC meningkat, apalagi HIV/AIDS, jangan ditanya”, ungkapnya. Banyak sudah orang mati di Mimika, hanya karena hak kesehatannya tidak dipenuhi. “Di mana negara dengan petugas-petugasnya selama ini? Mereka seharusnya datang, bukan menyalahkan orang yang mati, karena dianggap sudah sakit lama tetapi tidak berobat”, lanjut Adadikam, kesal.

Demikian pula dengan situasi pendidikan, kondisinya tidak jauh lebih baik. Minimnya kualitas sumberdaya manusia menjadi bukti kurang terurusnya pemenuhan hak atas pendidikan di wilayah ini. Data resmi pemerintah menunjukkan mayoritas penduduk Mimika hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Hal itu bisa dilihat dari angka partisipasi sekolah yang terus menurun, seiring dengan naiknya jenjang pendidikan. Data tahun 2008 menunjukkan angka partisipasi sekolah dasar untuk mencapai 92,85, naik ke tingkat SLTP angkanya turun menjadi 89,28, sedangkan untuk tingkat SMA, angkanya hanya 41,40. Bahkan pada angka partisipasi murni lompatannya cukup mengkhawatirkan, APM sekolah dasar berada pada angka 92,85, di tingkat SLTP turun menjadi 53,91, dan di tingkat SMA hanya menjadi 24,44. Rata-rata lama sekolah warganya, hanya 6,5 tahun, artinya sebagian besar penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.

Sekretaris Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika,<sup>42</sup> Simon Petrus Mess, beralasan buruknya kualitas pendidikan disebabkan oleh banyak faktor, seperti tempat tinggal warga yang berpindah-pindah, jauhnya akses sekolah dengan pemukiman penduduk, dan tidak tersedianya tenaga pendidik. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah telah membangun sentra pendidikan, yang disediakan asrama sekaligus. Langkah tersebut dilakukan sebagai satu bentuk afirmasi bagi warga-warga lokal yang tinggal di pedalaman, jauh dari akses sekolah. Kesadaran warga tentang arti penting pendidikan, juga kian membaik, terbukti dengan meningkatnya permintaan sekolah-sekolah kecil di kampung-kampung, meski jumlahnya juga belum banyak, aku Simon. Namun, program sekolah kecil lagi-lagi terganjal kekurangan tenaga pengajar, seperti halnya pendirian puskesmas pembantu, yang tidak tersedia tenaga medis.

Ignatius Adii, praktisi pendidikan di Kabupaten Mimika, mengungkapkan persoalan yang lebih kompleks. Menurutnya ada beberapa permasalahan yang melatarbelakangi buruknya kualitas pendidikan di Mimika, antara lain: *Pertama*, sedikitnya tenaga pendidik yang berdedikasi, mereka kurang disiplin, hanya datang ke sekolah ketika awal penempatan, setelah itu tak pernah datang kembali, atau pun kalau datang hanya seminggu sekali. Itu terjadi akibat jauhnya sekolah dengan tempat tinggal penduduk, kalau pun diberikan pemukiman, mereka rata-rata tidak bertahan lama, karena tidak siap untuk bermukim di pedalaman. Hal itu berdampak lebih jauh pada kelulusan siswa, yang tidak bisa lulus murni—ada manipulasi kelulusan, sehingga ketika siswa hendak bersekolah ke luar daerah, mereka masih tertinggal, tidak bisa baca tulis; *Kedua*, jauhnya jarak sekolah dan sulitnya medan untuk mencapai sekolah, menjadikan sering terhambatnya komunikasi, dan transportasi, sehingga Dinas Pendidikan tidak bisa melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap keberadaan guru di sekolah-sekolah; *Ketiga*, guru-guru SMP tidak memotivasi siswa-siswanya untuk melanjutkan ke pendidikan menengah, sehingga angka putus sekolah tinggi; *Keempat*, pendidikan-pendidikan non-formal hanya tersedia di Kota Timika, sementara di wilayah lain tidak tersedia. Itu pun hanya Kejar Paket A, B, dan C, tidak tersedia pendidikan-pendidikan ketrampilan; *Kelima*, orang tua siswa pun kurang memberi motivasi pada anak-anaknya untuk bersekolah, dan tentang arti penting pendidikan.<sup>43</sup>

Perubahan sistem pendidikan juga berpengaruh besar bagi memburuknya situasi pendidikan di Mimika. Dahulu, ketika masa kolonial Belanda, periode 1908-1967, pendidikan di Mimika menggunakan sistem **Loso** dan **Moso**,<sup>44</sup> dimana siswa dan guru di asramakan dalam satu tempat, mulai dari sekolah rakyat hingga SLTA. Sekolah-sekolah ini diselenggarakan oleh yayasan-yayasan swasta, seperti Yayasan Pelayanan Persekolahan Kristen (YPPK), yang berada di bawah Keuskupan Jayapura, dan gereja-gereja di bawah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.<sup>45</sup> Sistem ini cukup berhasil, dan

<sup>42</sup> Di Kabupaten Mimika, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan dipecah menjadi dua bagian, Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah. Menurut Pengakuan Simon P. Mess, hal itu dilakukan agar masing-masing bisa bekerja lebih fokus. Ketika diatanya apakah ada faktor politis yang melatarbelakangi, dia menjawab lugas, "itu kebijakan bupati".

<sup>43</sup> Ignatius Adii, Permasalahan Pendidikan Kabupaten Mimika serta Alternatif Pemecahannya, Makalah dalam seminar pendidikan yang diselenggarakan LPMK, di Timika 15-16 Juni 2010.

<sup>44</sup> LOSO: *Lageere Onderwijs Schools Ordonantie*. MOSO: *Middelbare Onderwijs Schools Ordonantie*. Kedua institusi tersebut dilegalisasi oleh pemerintah Belanda dalam bentuk Undang-Undang Loso dan Moso.

<sup>45</sup> Dari Keterangan Theo Van Den Broek, seorang Belanda yang telah bekerja di Keuskupan Jayapura semenjak 1975, menyebutkan dalam tulisannya bahwa keterlibatan institusi swasta, khususnya gereja dalam menyediakan layanan pendidikan sudah berlangsung semenjak lama. Beragam upaya dilakukan oleh yayasan-yayasan pendidikan Kristen, bahkan mereka hingga mengupayakan kredit untuk mengadakan pendidikan di wilayah-wilayah pedalaman. Melihat hal itu, dahulu ketika pemerintah Belanda berkuasa mereka menyadari arti

mutu pendidikan terjamin, dibuktikan dengan banyaknya lulusan YPPK yang berhasil melanjutkan ke sekolah-sekolah di luar daerah. Selain itu, sistem pendidikan ini juga menyediakan pendidikan-pendidikan kekhususan dalam rangka penyediaan tenaga medis dan kebutuhan tenaga pengajar.

Awal kehancuran pendidikan Mimika terjadi semenjak tahun 1968, ketika sistem pendidikan disentralisasi oleh Jakarta. Loso dan Moso dibubarkan, digantikan dengan sejumlah SD Inpres (Instruksi Presiden) di kampung-kampung.<sup>46</sup> Akibat pembangunan SD Inpres, banyak warga memindahkan anaknya ke SD Inpres, keluar dari asrama-asrama yayasan, karena biaya di SD Inpres dianggap lebih murah. Namun demikian SD Inpres hanya mampu bertahan setahun, setelah itu tidak ada lagi tenaga pengajar yang bersedia mengajar di kampung-kampung, kalau pun datang, paling setahun sekali. Situasi di Mimika tentu berbeda dengan di Jawa, sayangnya pemerintah memaksakan sistem-sistem yang ada di Jawa, untuk diterapkan di Mimika. Akibatnya, gedung-gedung sekolah tersedia, tapi guru dan muridnya tidak ada. Gurunya tak pernah datang karena jauhnya jarak dan sulitnya medan, dan muridnya pun demikian. "Kondisi ini makin parah, setelah adanya dana satu persen dan dana rekognisi dari Freeport, orang tua hanya mengharapkan anaknya mendapatkan bea siswa, kurang memperhatikan mutu dan pentingnya pendidikan keluarga", dijelaskan oleh Ignatius Adii.<sup>47</sup>

Parahnya situasi tersebut, senyatanya juga kurang coba diperbaiki dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah kabupaten. Mungkin mereka mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dana-dana dari LPMK. Dari total 1,4 triliun rupiah dana APBD Kab. Mimika, hanya 15,52% atau sebesar Rp 148.211.803.215,00 yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Penganggaran tersebut tentunya tidak memenuhi alokasi yang penganggaran yang diwajibkan oleh konstitusi republik, UUD 1945, yang mewajibkan penggaran untuk alokasi pendidikan minimal 20% dari total APBD.

---

penting gereja dalam pengembangan pendidikan, sehingga mereka memberikan subsidi pokok termasuk membayar guru, dan secara diam-diam biaya operasional sekolah. Pada awal pemerintahan republik, kebijakan yang sama masih diterapkan. Namun setelah rezim berubah, pemerintah menghentikan sumbangan pendidikan dan bantuan lainnya bagi sekolah swasta. Pemerintah meminta sekolah swasta untuk mengusahakan sendiri fasilitas-fasilitas pendidikannya. Lihat Theo Van Den Broek, *Op. Cit.*, hal. 286-287.

<sup>46</sup> Presiden Soeharto waktu itu memerintahkan pembangunan SD melalui sebuah instruksi presiden, sehingga dikenal dengan SD Inpres. Proyek ini merupakan berkah dari oil boom, akibat kenaikan harga minyak yang begitu fantastis, masa ketika Indonesia mengalami surplus ekspor minyak.

<sup>47</sup> Transkrip paparan Ignatius Adii, pada seminar pendidikan yang diselenggarakan LPMK, di Timika 15-16 Juni 2010. Situasi serupa hampir dialami oleh seluruh wilayah di Papua, dijelaskan oleh Theo Van Den Broek, bahwa buruknya kualitas pendidikan di tanah Papua, terjadi akibat: (1) mentalitas pengajar yang tidak benar-benar termotivasi untuk menjadi pengajar, sekedar mencari honorarium tetap; (2) keamanan lokasi dalam mengajar yang tidak terjamin, sehingga para pengajar memilih berpindah tempat; (3) pemerintah gagal untuk bertindak secara adil. Para pengajar yang tidak pernah datang mengajar, menerima gaji tetap dan bantuan, bahkan promosi pendidikan, tetapi yang rajin mengajar justru tidak mendapatkannya; (4) Tidak adanya sanksi bagi para pengajar yang gagal dalam memberikan pengajaran; (5) Kualitas para pengajar yang buruk, sebagian diantaranya bahkan tidak lancar baca tulis; (6) kurangnya pengajar eksakta; (7) Banyak para pengajar dalam proses penyeleksiannya tidak memenuhi kualifikasi; (7) Kurangnya kesadaran orang tua tentang arti penting pendidikan, sehingga mereka tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya; (8) adat bahwa kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk datang ke sekolah; (9) ketiadaan pengawasan dari dinas pendidikan pada sekolah-sekolah; (10) Metode pendidikan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi Papua, kurikulumnya tidak selaras dengan budaya lokal Papua, tetapi justru mengadopsi Jawa; dan (11) Anggaran resmi pemerintah yang tak pernah memberi prioritas pada pendidikan. Lihat Theo Van Den Broek, dalam *Op. Cit.*, hal. 291-292. Kesimpulan yang dikemukakan oleh Broek ini, persis dengan apa yang ditemukan di Mimika, buruknya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh kurang dan buruknya sumberdaya manusia, buruknya kurikulum, minimnya dukungan anggaran pemerintah, kurangnya fasilitas, dan budaya lokal yang kurang sedikit kurang mendukung pemajuan pendidikan.

Tabel 6: Alokasi Anggaran Pendidikan Kab. Mimika 2010

Alokasi Anggaran	Versi Pemda	Presentase	Versi Demos	Presentase
Belanja Aparat	91.750.706.215	61,91%	115.389.935.215	77,85%
Belanja Publik	56.461.097.000	38,09%	32.821.868.000	22,15%
<b>Total</b>	<b>148.211.803.215</b>	<b>100%</b>	<b>148.211.803.215</b>	<b>100%</b>

**Sumber:** APBD Kabupaten Mimika 2010.

Pembagian dinas menjadi Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah makin memperburuk besaran anggaran pendidikan, karena anggaran untuk belanja pegawai menjadi lebih besar. Dari total anggaran pendidikan, menurut versi Demos, hanya sebesar 22,15% saja yang digunakan untuk biaya belanja publik, atau sebesar Rp 32.821.868.000,00 baik untuk pendidikan dasar maupun menengah. Sedangkan separuh lebih sisanya, sebesar 77,85% digunakan untuk belanja aparat, atau sebesar Rp 115.389.935.215,00.

Ironis, sejumlah daerah lain yang APBD-nya tidak sebesar Kab. Mimika berupaya memperbesar anggaran pendidikan mereka, hingga 30% lebih dari total APBD, sementara Mimika yang nilai APBD-nya begitu fantastis, dengan persoalan pendidikan yang begitu kompleks, justru kurang memberi perhatian lebih untuk sektor pendidikan. Nampaknya masa depan orang Mimika belum akan membaik dalam waktu dekat, mengingat masih rendahnya komitmen pemerintah daerah pada pendidikan. Anggaran belanja publik yang dialokasikan di APBD, sepadan dengan dana LPMK yang dialokasikan untuk program pendidikan. Setiap tahun LPMK mengucurkan dana paling sedikit 31,65 milyar rupiah untuk program pendidikan, dan paling banyak pada tahun 2007, ketika LPMK menggulirkan dana sebesar 42 milyar rupiah, dikarenakan LPMK membiayai pembangunan fisik beberapa sekolah dan asrama.

Selain dari sisi anggaran, buruknya komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan juga dapat dilihat dari minimnya jumlah sekolah yang tersedia. Pada tahun 2008, secara keseluruhan kabupaten Mimika memiliki 183 sekolah, dengan perincian 49 sekolah taman kanak-kanak, 93 sekolah dasar, 26 sekolah menengah tingkat pertama dan 15 sekolah menengah atas (SLTA), dengan komposisi 9 SMU dan 6 SMK. Sungguh ironis, jumlah SLTP, yang seharusnya bisa menampung keseluruhan lulusan sekolah dasar, jumlahnya justru lebih kecil dibanding ketersediaan taman kanak-kanak. Bahkan beberapa distrik (kecamatan), seperti Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Barat, serta Distrik Jita, hanya memiliki 3 sekolah dasar dalam satu distrik.<sup>48</sup>

Pada dasarnya masyarakat sudah memahami atau paling tidak mengerti tentang posisi mereka sebagai warganegara dengan seperangkat hak. “Di dalam undang-undang dasar sudah sangat jelas sekali, penegasan mengenai hak-hak warganegara. Orang yang pernah bersekolah, dan belajar Pancasila serta UUD 1945, pasti tahu hak-haknya sebagai warga negara, tidak perlu jauh-jauh orang di pedalaman Papua sana”, tegas Adadikam. Masalahnya kemudian, adalah implementasi untuk mendapatkan hak-hak tersebut. **“Sudah umum di Indonesia, hampir di semua tempat, bahkan di wilayah-wilayah yang sudah bergabung dengan Indonesia sejak awal, orang-orang bingung**

<sup>48</sup> BPS Kabupaten Mimika, Mimika Dalam Angka, 2009.



**mendapatkan hak-haknya. Apalagi di Papua, yang baru bergabung dengan Indonesia kemarin”, lanjutnya.**

Menurut Adadikam, khusus di Papua, buruknya pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dipengaruhi oleh situasi masa Orde Baru. Periode kepemimpinan Soeharto menjadi masa sulit bagi orang Papua, untuk mengekspresikan apa yang mereka tahu tentang haknya sebagai warganegara. Problemnya ketika masyarakat menuntut hak-haknya sebagai warganegara, mereka akan dituduh melawan pemerintah, sparatis, dan makar. Artinya, persoalannya bukan pada ketidaktahuan, tetapi lebih pada ketidak-tersediaan jalan untuk menggapai hak itu. Buruknya layanan birokrasi, yang membusuk hingga semua lini, diakui menjadi penghalang terbesar tidak bisa digapainya hak-hak warganegara. Akhirnya mengutip orang Jawa, daripada dituduh macam-macam, lebih baik *nrimo* – menerima saja.

Presiden Yudhoyono, yang diharapkan bisa menjembatani penyelesaian beranekaragam persoalan di Papua, senyatanya tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. “Orang Papua tetap dicap sparatis, makar, OPM, dan itu digunakan pemerintah Yudhoyono sebagai peluru-peluru untuk menembak orang Papua, agar tidak menuntut hak-haknya sebagai warganegara”, keluh Adadikam. Menurutnya, perusahaan seperti Freeport tak bisa terus disalahkan dalam persoalan pemenuhan hak, titik tekan mereka pada keuntungan, bukan pelayanan. Seharusnya ada negara di sana, tetapi negara sekarang di mana? **“Model kami di Papua, semuanya harus minta, padahal itu hak kami, tetapi ketika kami meminta malah dituduh macam-macam, daripada kami berjuang tetapi bernasib seperti itu, lebih baik kami diam saja”**, lanjutnya.

Pendapat yang hampir serupa juga dikatakan oleh Allo Raфра, menurutnya, warga sesungguhnya tahu, bahwa negara harus memberikan pelayanan atas hak-haknya sebagai warga. Tetapi permasalahannya ada pada negara, yang tidak mau memberikan pelayanan. Mental pegawai pemerintah belum siap untuk memberikan pelayanan kepada warga. Setiap tahun pengangkatan ratusan guru, dan tenaga kesehatan, namun kenyataannya mereka tak bisa ditemukan di tempat-tempat layanan. Hal seperti itu sudah berlangsung lama, sehingga masyarakat sudah apatis, selalu ada yang minta tetapi tidak pernah diberi. Itu kian diperburuk akibat mekanisme yang seharusnya berjalan di pemerintah tidak berjalan, ketika masyarakat hendak melaporkan keluhannya, Kepala Distrik selaku wakil pemerintah jarang di tempat, lalu masyarakat mau lapor kemana? Mereka ada kantornya tapi tidak pernah ada petugas. “Ketika saya jadi Plt. Bupati, mulut saya sampai kering untuk menegur kepala-kepala distrik yang jarang di tempat, dan saat ini justru kian parah kelakuannya”, cetus Raфра. Pendek kata, mekanisme pengawasan dari bupati, tidak berjalan dengan efektif.

Lalu kemana masyarakat mengadu? Selama ini, sebenarnya masyarakat banyak yang datang melapor ke DPR Kabupaten Mimika. Tetapi keterbatasan fungsi DPR Kabupetan, menjadikan tidak bisa berbuat lebih, selain menampung laporan dari masyarakat, memfasilitasi pertemuan dengan pihak eksekutif, dan mengawasi kinerja-kinerja eksekutif. “DPR tak punya kewenangan menindak toh?” Raфра menambahkan. Sayangnya, eksekutif nampaknya kurang responsif atas desakan-desakan dari masyarakat. DPR Kabupaten, seringkali memfasilitasi warga dengan bupati dengan jajaran dinas terkait, untuk menyelesaikan beragam persoalan menjadi keluhan warga, tetapi sepertinya setelah pertemuan berakhir, pemerintah tidak segera menyelesaikannya.

Dicontohkan Raфра, seperti kasus yang menimpa pedagang Pasar Swadaya. “Bisa lihat orang di Pasar Swadaya, yang terbakar tiga bulan lalu. Mereka datang ke DPRD, meminta kami memikirkan nasib mereka. Tetapi karena kami tidak memiliki kewenangan, kami hanya memfasilitasi mereka bertemu dengan bupati. Dalam pertemuan bupati berjanji akan segera mengurus mereka. Tetapi apa yang terjadi? Pemerintah tak pernah menyelesaikannya, tidak memberikan perhatian pada mereka. Sudah tiga bulan mereka tidur dan bertempat tinggal di pinggir-pinggir jalan”, keluh Raфра. Ketika ditanya mengenai program-program bupati yang digulirkan untuk peningkatan kesejahteraan warga, Raфра hanya menjawab, “Bupati ada program sekolah gratis, kesehatan gratis, tapi realisasinya mana, petunjuknya mana? Dahulu, ketika saya menjabat Plt. Bupati, setiap selesai pembahasan APBD, kami selalu menyampaikan secara terbuka pada masyarakat. Sekarang itu tidak ada, masyarakat tak pernah tahu uang-uang mereka digunakan untuk apa”.

Secara umum, ketiadaan keberpihakan negara, khususnya pemerintah daerah, terhadap upaya-upaya pemenuhan hak-hak sosial ekonomi warganya, dapat dilihat dari kecilnya prosentase anggaran yang digulirkan untuk belanja publik, dan program pemberdayaan, seperti dapat dilihat dalam tabel alokasi anggaran di atas. Mayoritas anggaran justru dialokasikan untuk pemerintah sendiri, melalui pos otonomi daerah. Sedikitnya 52,58% dari total APBD Mimika, dialokasikan untuk pos ini. Sementara dana pendidikan dan kesehatan prosentasenya begitu kecil, bahkan tidak memenuhi persyaratan minimal yang disebutkan dalam konstitusi, UUD 1945. Pemerintah kabupaten nampaknya terlalu menggantungkan kebutuhan layanan masyarakatnya pada LPMK, dan dana-dana yang digulirkan pemerintah propinsi yang kucurkan dari dana Otsus.

Tabel 7: Alokasi APBD Kabupaten Mimika 2010

No	Bidang	Belanja (Rp)	Prosentase
1	Pendidikan		15,52%
	Dinas Pendidikan Dasar	148.211.803.215	
	Dinas Pendidikan Menengah	68.296.407.537	
2	Kesehatan		9,24%
	Dinas Kesehatan	55.193.356.804	
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	73.699.569.000	
3	Pekerjaan Umum		6,75%
	Dinas Pekerjaan Umum	94.218.035.000	
4	Kebersihan		1,22%
	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota	17.089.466.000	
5	BAPPEDA		1,50%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.992.913.000	
6	Perhubungan		1,11%
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.506.170.000	
7	Lingkungan Hidup		0,34%
	Badan Lingkungan Hidup	4.738.958.450	
8	Kependudukan dan Catatan Sipil		0,56%
	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Perijinan	7.800.072.000	
9	Pemberdayaan Perempuan dan KB		0,30%
	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	4.164.872.000	

10	Kesejahteraan Sosial		0,34%
	Dinas Kesejahteraan Sosial	4.757.278.000	
11	Ketenagakerjaan		0,39%
	Dinas Tenaga Kerja	5.454.250.000	
12	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		2,23%
	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	31.144.359.000	
13	Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata		1,00%
	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan & Pariwisata	13.943.848.000	
14	Politik		0,54%
	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.414.089.000	
	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	5.051.683.000	
16	OTONOMI DAERAH		52,58%
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.524.375.000	
	Bupati dan Wakil Bupati	1.567.485.000	
	Sekretariat Daerah	646.289.721.102	
	Sekretariat DPRD	47.400.821.000	
	Inspektorat	8.991.767.000	
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.959.889.000	
	Dinas Pendapatan Daerah	14.734.396.692	
17	Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		0,35%
	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	4.812.982.000	
18	Pemberdayaan Masyarakat		3,12%
	Badan Pemberdayaan Masyarakat	43.461.516.000	
19	Perpustakaan dan Arsip		0,16%
	Kantor Perpustakaan dan Arsip	2.260.100.000	
20	Pertanian dan Tanaman Pangan		0,70%
	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	9.755.595.000	
21	Peternakan		0,58%
	Dinas Peternakan	8.155.980.000	
22	Kehutanan dan Perkebunan		0,52%
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	7.284.937.000	
23	Pertambangan dan Energi		0,35%
	Dinas Pertambangan dan Energi	4.911.881.000	
24	Kelautan dan Perikanan		0,59%
	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.277.735.000	
<b>TOTAL APBD</b>		<b>1.395.066.310.800</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: APBD Kabupaten Mimika, 2010.

## Kanker Stadium Akut: Hilangnya Wibawa Republik

*“Masyarakat sudah pada tingkat frustrasi yang tinggi, sedikit harapan ada pemerintah, jika punya keinginan baik, untuk membangun Papua sebagai bagain dari republik, tetapi kalau sudah tidak dianggap ya biarkan kami sendiri”.*

[Pdt. Matheus Adadikam, GKI Tanah Papua Klasis Mimika]

**“Orang Papua sudah mati banyak untuk menuntut haknya, ketika menuntut hak mereka distigmatisasi sebagai sparatis, untuk bergerak orang Papua sulit. Persoalannya semua ini Jakarta yang stel, jadi remot ada di Jakarta, pemerintah tidak tulus memberikan otonomi khusus ke Papua, hanya untuk hiburan-hibur saja”,** gerutu Mathius Adadikam. Pernyataan tersebut sebenarnya menggambarkan apatisme warga Mimika atas semua kemelut persoalan yang melingkupinya, dan tak pernah ada penyelesaiannya. Thomas Wanmang, yang mewakili orang Amungme menyatakan, hanya orang Papua yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, bukan orang luar. **“Lebih baik kami mengusahakkannya sendiri jika situasi terus seperti ini, tetapi tolong jangan ganggu kami terus”,** Wanmang meradang.

Beragam permasalahan menumpuk di wilayah Mimika, tetapi tak pernah diselesaikan. Pemerintah hanya menjadi simbol semata, yang tidak bekerja secara konkrit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Perang Kwamkilama, yang terjadi hampir setiap minggu, dan tak pernah diselesaikan, menjadi satu contoh tidak bekerjanya negara. Masyarakat dibiarkan terus berkelahi, sehingga mereka tidak ada lagi kesempatan untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya lagi. Beberapa informan menengarai, bahwa situasi demikian sesungguhnya ada yang menciptakan, artinya konflik memang dibiarkan terus terjadi agar kondisi tidak aman berlangsung terus-menerus. Disebutkan Pdt. Matheus Adadikam, **“orang di pinggir jalan, yang telanjang, berkoteka pun tahu, bahwa konflik ini diciptakan oleh satu kelompok tertentu. Orang mengatakan itu, sebenarnya diarahkan ke negara, permainan intelejenkah?”**

Ada dugaan, bahwa konflik-konflik yang terjadi selama ini di Mimika, berkait erat dengan posisi politik bupati, dan upaya aparat keamanan untuk mempertahankan keberadaannya di tanah Papua. Oknum-oknum dari negara ditengarai sebagai pihak yang bertanggungjawab menciptakan situasi-situasi tidak aman, demi memperebutkan rente yang disediakan Freeport. Uang Freeport yang dibelanjakan untuk membiayai aparat keamanan republik nilainya sungguh fantastis, data Global Witness menunjukkan Freeport Indonesia kelihatannya telah melakukan pembayaran kira-kira sebesar 16,000 dollar AS sebulannya untuk sebuah batalyon infantri; kemudian 16.000 dollar AS sebulan kepada Kodim; kemudian 13.000–15.000 dollar AS sebulan untuk sebuah batalyon Brimob, kira-kira 19.000 dollar AS sebulan untuk polisi setempat, dan 22.000 dollar AS sebulan untuk sebuah pasukan tugas keamanan yang menjaga perusahaan.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Lebih jauh lihat, laporan Global Witness, *Uang Keamanan: Pertambangan Freeport dan Aparat Keamanan Indonesia*, yang dikeluarkan pada bulan Juli 2005.

Sementara DPRD, yang nampak menjadi tempat pelarian dari masyarakat yang hendak mengadu ke bupati, tetapi tak pernah bertemu, mengaku tidak mampu memberikan solusi konkrit terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi warga. Allo Raфра menegaskan, “DPRD ini berasal dari banyak unsur, latar belakang politiknya beranekaragam, semuanya memiliki kepentingan. Bupati adalah Ketua DPD Partai Golkar, yang juga mendapat dukungan dari mayoritas anggota DPRD, Ketua DPRD sendiri bahkan adik kandung bupati, jadi kami tak bisa berbuat lebih”. Problem politik keluarga memang tengah merebak menjadi isu hangat di Mimika, ini berkaitan dengan keterpilihan adik kandung bupati sebagai Ketua DPRD, dan ketegangan di Kwamki Lama yang tak segera berakhir.<sup>50</sup>

Konflik di Kwamki Lama menjadi berkaitan, dikarenakan wilayah ini adalah kampung halaman bupati berkuasa, Klemen Tinal. Akan tetapi setelah ketegangan tersebut berlangsung dalam jangka waktu cukup lama, bupati seperti tak mampu mendamaikannya. Akibatnya justru muncul sinyalemen, bahwa konflik di Kwamki



Lama sengaja di desain untuk menutup isu tidak sedap, yang tengah kencang menyerang bupati dan keluarganya. Sekaligus juga untuk mengesankan kondisi ketidak-amanan di Mimika. Dalam beberapa demonstrasi, isu politik keluarga selalu dimunculkan oleh mereka para warga Mimika. Selain dukungan dari adiknya sebagai Ketua DPRD Mimika, Klemen Tinal, adalah Ketua DPD Partai Golkar Mimika, sehingga secara politik, bupati berkuasa memiliki dukungan yang sangat kuat.

Jangankan untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak ekonomi sosial, untuk menciptakan satu situasi yang damai, orang bebas mengekspresikan sikap politiknya, dan status sipil kewarganegaraannya diakui, pun belum bisa dinikmati sepenuhnya. Jauh tertinggal dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Negara yang semestinya menjadi penengah, dan bisa menyelesaikan semua persoalan ini justru seperti lari dari tanggung jawab. Diungkapkan oleh Amartya Sen, bahwa kemampuan dan peluang seseorang untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya,

<sup>50</sup> Theo Van Den Bork, dengan meneruskan pandangan Sidney Jones menengarai, situasi ini terjadi salah satunya dipicu karena persaingan antar-klan yang mengarah pada kecenderungan primordial, untuk menduduki kursi-kursi kekuasaan pemerintahan. Dijelaskannya, semua itu berlangsung dikarenakan pemekaran wilayah Papua yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Pemekaran yang berlangsung secara serampangan telah melahirkan beragam gangguan. Dalam identifikasi Broek, beberapa gangguan akibat pemekaran wilayah yang terburu-buru adalah: (1) gangguan layanan dasar pada wilayah bersangkutan; (2) ketegangan yang meningkat antara masyarakat dan etnis lokal; (3) menguatnya mentalitas proyek, selama uang tersedia dan koneksi, bukanlah suatu rahasia bahwa mereka yang mengambil keuntungan dari peluang-peluang ekonomi baru ini datang dari populasi non-lokal; (4) kecenderungan 'pembagian kembali' mendorong masyarakat untuk melihat lebih jauh dan pembagian-pembagian kembali, pada tingkat terendah, guna memperoleh akses ke anggaran untuk proyek-proyek khusus atau program-program bantuan; (5) menciptakan lahan subur untuk meningkatnya tindak korupsi; (6) penyeleksian sumberdaya manusia untuk posisi-posisi baru dengan menggunakan kriteria yang salah telah berbuah pada ketidakmampuan, kolusi, korupsi, dan nepotisme; (7) meningkatnya ambisi-ambisi pribadi; dan (8) masyarakat lokal yang tidak memahami apa yang sedang terjadi tapi mengalami bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka tidak benar-benar diperhatikan bahkan tak pernah dipenuhi, sementara di sisi lain mereka terus mengamati elite-elite baru menghabiskan uang yang tersedia. Lihat Theo Van Den Broek, dalam *Op. Cit.*, hal. 265.

harus didukung oleh negara dengan membuka kesempatan ekonomi yang seluas-luasnya, tidak adanya penindasan sosial, adanya pelayanan publik yang baik dari negara, serta tidak adanya sikap represif dari aparat negara.<sup>51</sup> Dengan sejumlah prasyarat tersebut, nampaknya masih jauh harapan bagi warga Mimika untuk dipenuhi hak-hak sosial ekonominya.

Bahkan, sejumlah informan menengarai, negara – pemerintah daerah justru menikmati dan mempertahankan situasi demikian, demi menjaga kekuasaan dan sumberdaya yang selama ini telah dinikmati oleh segelintir elit tertentu. Seperti diungkapkan Gregorius Okoare, **“masyarakat tidak tahu harus melakukan apa dan harus kemana, pemerintah hanya kelihatan dari jauh, tetapi ketika kami datang, pemerintah tidak lagi di tempat. Karena sudah ada Freeport, maka kami minta ke Freeport saja”**. Dari pernyataan itu, bisa dikatakan, bahwa selama ini sesungguhnya masyarakat lebih menggantungkan diri pada keberadaan Freeport, sementara pemerintah hanya simbol administratif semata.

Lemahnya keberpihakan negara, terhadap langkah-langkah pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial, dapat dibuktikan dari minimnya dukungan anggaran untuk bidang tersebut. Pos-pos urusan wajib pemerintah, dalam rangka pemenuhan hak-hak warga, yang seharusnya mendapat prioritas, justru alokasinya di bawah standar. Alokasi anggaran kesehatan hanya 9,24% dari total APBD. Padahal khalayak umum pun tahu, bagaimana buruknya situasi kesehatan penduduk Mimika. Bahkan untuk alokasi anggaran pendidikan, prosentasenya jauh di bawah yang dimandatkan oleh konstitusi, sebesar 20% dari total anggaran. Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Mimika 2010, totalnya hanya 15,52% dari keseluruhan dana APBD.

Sedangkan jumlah alokasi anggaran untuk pemerintahan umum, menempati prioritas nomor satu, prosentasenya mencapai 52,58%, dengan nominal lebih dari 600 miliar rupiah. Sementara anggaran untuk Bupati totalnya mencapai Rp 1.567.485.000,00. Besarnya anggaran pemerintahan umum, telah menjadi perbincangan hangat di antara warga dan para anggota DPRD Mimika. “Bupati beralasan anggaran tersebut akan dialokasikan sebagai dana bantuan sosial, tetapi mengapa tidak digunakan saja untuk program pemberdayaan masyarakat dan belanja publik lainnya?” Keluh Allo Raфра, Anggota DPRD Mimika. Melihat prosentase anggaran Kabupaten Mimika memang sungguh memprihatinkan. Dalih bahwa anggaran sekretariat daerah, akan banyak digunakan untuk dana publik, pun senyatanya tidak demikian. Dari total 400 milyar lebih alokasi dana untuk sekretariat daerah, hanya 34,85% saja yang digulirkan untuk belanja publik, sisanya habis untuk belanja aparat.

Pemborosan dalam penggunaan alokasi urusan pemerintahan umum, pada sekretariat daerah terlihat begitu kentara. Sebagai contoh, Sekretariat Daerah mengalokasikan dana untuk keperluan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain, yang besarnya mencapai 20 milyar rupiah, dana untuk rapat koordinasi Muspida sebesar 10 milyar rupiah, dana pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar 5,9 milyar rupiah, dana penyediaan penunjang rumah tangga kepala daerah dan wakil sebesar 8 milyar rupiah, dan masih banyak jenis pemborosan lainnya. Fakta demikian memperlihatkan bahwa di tengah

<sup>51</sup> Amartya Sen, *Development AS Freedom*, (New York: Alfred A. Knopf, 2000), hal. 3-7.

situasi kemiskinan yang mendera rakyat Mimika, para pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten justru tidak segan-segan untuk berfoya-foya.

Tabel 8: **Prioritas Anggaran Sekretariat Dearah Kabupaten Mimika**

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Belanja Aparat	Belanja Publik
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>403.197.008.102</b>		
1	Belanja pegawai		5.543.156.000	
2	Belanja hibah			34.500.000.000
3	belanja bantuan sosial			107.740.110.189
4	Belanja bagi hasil kepada prov/kota/pemdes		136.000.000	
5	Belanja bantuan keuangan kepada propinsi, kab/kota/pemdes		235.277.741.913	
6	Belanja tidak terduga		20.000.000.000	
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>4.902.490.000</b>		
1	Program pelayanan adm kantor	4.555.340.000	4.555.340.000	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparat	266.650.000	266.650.000	
3	Program peningkatan disiplin aparat	15.000.000	15.000.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65.500.000	65.500.000	
	<b>Total</b>	<b>408.099.498.102</b>	<b>265.859.387.913</b>	<b>142.240.110.189</b>
	<b>Prosentase</b>	<b>100%</b>	<b>65,15%</b>	<b>34,85%</b>

**Sumber:** APBD Kabupaten Mimika, 2010.

Akibat perilaku aparatus negara, yang kurang memberikan pelayanan, kepercayaan warga pada lembaga-lembaga pemerintah lambat laun pudar. Tidak saja kesulitan mendapatkan layanan, bahkan ketika menuntut ke lembaga-lembaga pemerintah, mereka tidak jarang akan dicap sparatis, tutur Pdt. Matheus Adadikam. Gereja pun lama-kelamaan bernasib sama, akibat tidak adanya solusi konkrit dari Gereja. “Mereka pun mulai tidak percaya pada gereja yang selalu hanya mengatakan ooh tenang”, lanjut Adadikam. Sementara gereja-gereja yang kritis terhadap pemerintah, dan kondisi yang terjadi di Mimika, justru dianggap mendukung sparatisme, seperti kasus yang menimpa beberapa gereja di bawah Sinode Gereja Injili di Tanah Papua. Bahkan seorang pendeta terpaksa harus meringkuk di penjara, karena dituduh membantu OPM. “Padahal gereja tugasnya mendorong keadilan dan kebenaran, jadi ketika kedua hal itu tidak dipenuhi, kami akan terus bicara”, tegas Ketua Sinode Gereja Injili di Tanah Papua Klasik Mimika ini. Masyarakat sendiri mengalami pengalaman traumatik dengan stigmatisasi OPM, karena itu berarti akan terjadi pembantaian dan perburuan massal oleh tentara, yang tidak memiliki indikator tegas mana OPM dan mana yang bukan OPM.

Menurut penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang dituangkan dalam Papua Road Map, meski Orde Baru telah jatuh, pendekatan

keamanan di Papua, belum mengalami perubahan berarti. Untuk merespon gerakan sparatisme, pengiriman pasukan masih menjadi pilihan utama pemerintah Jakarta, akibatnya kekerasan terhadap orang Papua, tidak kunjung berkurang hingga saat ini. Orang Papua kian tidak mempercayai pemerintah Indonesia, sebagai wakil negara, kekerasan yang terus-menerus dialami, menumbuhkan kesadaran kolektif tentang penderitaan bersama. Mengutip Theo Van Den Broek, dalam laporan penelitiannya, Muridan S. Widjojo, dkk, menyebutkan kekerasan yang dialami orang Papua begitu kompleks, tidak hanya kekerasan fisik, mereka juga mengalami kekerasan psikologis dan struktural. Secara detail dijelaskannya, orang Papua telah mengalami: (1) kekerasan terhadap individu; (2) kekerasan terhadap masyarakat pada suatu daerah; (3) kekerasan psikologis; (4) kegiatan bisnis yang berpeluang melanggar HAM; dan (5) kekerasan struktural yaitu kebijakan-kebijakan negara yang berpeluang melanggar HAM.<sup>52</sup>

Tidak saja mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari negara, dalam bentuk kekerasan politik yang terus-menerus, sehingga warga sulit untuk menggunakan saluran-saluran negara dalam memulihkan hak-haknya sebagai warga, mereka orang Papua juga mengalami marjinalisasi secara ekonomi. Kesempatan dan ruang mereka dipotong dari beragam sisi, dan untuk meminta kepada negara pun tak dapat. Negara menjadi sekedar simbol tanpa wibawa, yang tak bisa jadi tumpuan warganya di Papua.

### **Gerakan Sosial: Berharap pada Kelompok Keagamaan**

Pada situasi Mimika saat ini, gerakan sosial seharusnya bisa menjadi tumpuan terakhir bagi warga Mimika, dalam menuntut pemenuhan dan pemulihan hak-hak ekonomi sosialnya. Mengingat sulitnya untuk menggunakan saluran negara maupun saluran-saluran politik formal—partai politik khususnya, untuk menjadi rujukan dalam pemulihan hak-hak mereka sebagai warga. Namun sayangnya, keberadaan gerakan sosial selalu dipatahkan eksistensi dan peranannya. Baik oleh Freeport maupun pemerintah berkuasa. Tentunya dengan segudang cara dan akal bulus, tidak sekedar cap sparatisme atau pengacau keamanan.

Menurut penuturan Tjahjono E.P., jurnalis Tempo, di Mimika, ada beberapa skenario yang biasa digunakan untuk melumpuhkan eksistensi suatu gerakan sosial di Mimika. *Pertama*, upaya memunculkan ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap gerakan, dengan memanfaatkan kelompok masyarakat tertentu—kelompok bayaran, atau mengkooptasi gerakan dimaksud, sehingga terjadi konflik secara internal, yang berakibat masyarakat tidak percaya; *Kedua*, dengan kampanye langsung pada masyarakat, untuk tidak menggunakan saluran-saluran yang disediakan oleh gerakan sosial; *Ketiga*, dengan memberikan suntikan dana yang besar pada gerakan dimaksud, sehingga terjadi perpecahan internal, karena berebut dana; *Keempat*, dengan menarik aktor-aktor gerakan sosial ke dalam manajemen PT. Freeport Indonesia, atau dimasukkan ke dalam kepengurusan atau manajemen LPMK. Skenario keempat ini banyak dilakukan pada aktivis LEMASA dan LEMASKO. Bahkan diantaranya ada yang menjadi komisaris PT. Freeport Indonesia, akibatnya kedua lembaga yang sebelumnya menjadi tumpuan warga Mimika tersebut mengalami lumpuh layu. “Dahulu pernah ada LBH Pos Timika, WALHI, dan beberapa yang lain, tapi akhirnya mati sebelum berkembang, karena tidak kuat bertahan dengan gempuran-gempuran Freeport dan pemerintah”, tutur Thajono.

<sup>52</sup> Muridan S. Widjojo, dkk., *Op. Cit.*, hal. 13,



Pada masanya, Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), yang didirikan oleh Thomas Beanal, pada 1994, benar-benar bisa menegaskan otoritasnya, sebagai lembaga yang menjadi jembatan politik dan budaya, agar eksistensi orang Amungme, pemilik ulayat atas lahan yang dikuasai Freeport, dapat diakui. Melalui LEMASA, orang Amungme disatukan untuk melawan raksasa Freeport dan represi aparat militer, demi merebut kembali hak-haknya yang dirampas. Tidak hanya menjadi wadah persatuan orang Amungme, LEMASA juga menggalakkan program pemberdayaan ekonomi, melalui kredit-kredit mikro dan pembuatan kios-kios di kampung-kampung. Termasuk juga merebut ladang-ladang bisnis yang semula dikuasai TNI. LEMASA banyak juga melahirkan pemimpin-pemimpin politik lokal yang cukup berpengaruh di Mimika, karena lembaga ini sekaligus pula menjadi arena belajar politik bagi warga asli.<sup>53</sup> Yang paling terasa saat ini, adalah prakarsa LEMASA dan LEMASKO, dalam pendirian LPMK, yang kemanfaatannya dapat dinikmati secara langsung oleh warga asli.

Namun kebesaran LEMASA, pada akhirnya harus mengecil sedikit demi sedikit. Dana besar yang disuntikan untuk lembaga ini, baik dari LPMK, maupun Pemerintah Kabupaten Mimiki, justru memicu konflik internal, akibat perebutan sumberdaya. Manajemen LEMASA dikooptasi oleh proyek-proyek Freeport. Sementara tokoh LEMASA yang paling berpengaruh, Thomas Beanal memilih bergabung sebagai salah satu komisaris PT. Freeport Indonesia.<sup>54</sup> Pamor LEMASA hilang, kontribusinya tak lagi bisa dirasakan. Warga tidak lagi bisa memanfaatkan lembaga ini, sebagai tempat mencari solusi, atas serangkaian masalah yang mereka hadapi.

Saat ini, gerakan sosial yang bisa diharap untuk membantu masyarakat dalam memulihkan hak-haknya, adalah lembaga-lembaga berbasis keagamaan, khususnya gereja. Seperti diketahui, mayoritas warga Mimika adalah beragama Kristen Protestan, jumlahnya mencapai 42,2% dari seluruh penduduk. Mereka terbagi ke dalam beberapa gereja, sebagian besar masuk dalam Gereja Injili di Tanah Papua klasis Mimika, sebagian yang lain masuk dalam Gereja Kingmi Timika, Gereja Baptist dan beberapa gereja lainnya. Sementara penganut Katholik prosentasenya hanya 24,6%, namun begitu Kesukupan Mimika memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada warga Mimika, maupun para penyelenggara pemerintahan, karena sikapnya yang cenderung kritis. Sementara Gereja Protestan, mulanya lebih bersikap moderat dengan pemerintah, baru setelah reformasi, mereka bersikap kritis dengan pemerintah, termasuk melibatkan diri secara langsung dalam penegakan hak asasi manusia. Bahkan beberapa pendeta Gereja Protestan, terpaksa harus meringkuk di penjara, karena dituduh membantu OPM.

Sebagai sebuah gerakan sosial, gereja memberikan beberapa layanan sekaligus, tidak hanya rohani, gereja juga memberikan pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial, termasuk masalah-masalah aktual yang dihadapi para warga. Gereja memiliki otoritas yang mumpuni untuk mempengaruhi warga, maupun untuk menekan para penguasa. Selama ini, gerejalah yang dapat menyelamatkan diri dari rangkaian kooptasi PT. Freeport dan pemerintah berkuasa, sehingga tetap bisa berbicara kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, maupun perusahaan yang tidak berpihak pada warga. Selain bersuara kritis, gereja juga menjalankan serangkaian program swadaya, seperti

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 89.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 90.

pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan layanan pendidikan, sehingga kehadirannya tetap bisa diterima warga Mimika. Ancaman terbesar bagi gerakan gereja, adalah tuduhan sparatisme yang dilontarkan oleh aparat militer, bagi gereja-gereja yang bersikap terlalu kritis terhadap pemerintah.

## Bibliography

- Amartya Sen, *Development AS Freedom*, (New York: Alfred A. Knopf, 2000).
- Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*, (Jakarta: ELSAM, 2003).
- APBD Kabupaten Mimika Tahun 2010.
- Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 07/01/94/Th. IV, 4 Januari 2010.
- Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 08/01/94/Th. IV, 4 Januari 2010.
- BPS Kabupaten Mimika, Mimika Dalam Angka 2009.
- Dianto Bachriadi, *Merana Di Tengah Kelimpahan*, (Jakarta: ELSAM, 1998).
- George Junus Aditjondro, *Cahaya Bintang Kejora*, (Jakarta: ELSAM, 2000).
- Global Witness, *Uang Keamanan: Pertambangan Freeport dan Aparat Keamanan Indonesia*, Juli 2005.
- Jhon RG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, (Jakarta: Grasindo, 1993).
- John Saltford, *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962–1969: The Anatomy of Betrayal*, (New York: Routledge Curzon, 2003).
- Laporan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Provinsi Papua, 2009.
- Muridan S. Widjojo, dkk., *Papua Road Map: Negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future*, (Jakarta: LIPI, YOI, dan Yayasan TIFA, 2009).
- Theodor Rathgeber (ed), *Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya di Papua Barat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006).
- Winarno Yudho, dkk., *Aspek Sosio Yuridis dan Politik Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan MK*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK dan Konrad Adenauer Stiftung, 2006).

## Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Institusi
1	Alfian Kartono	Kontributor Metro TV
2	Gregorius Okoare	Tokoh masyarakat Suku Kamoro
3	Nur Fitriyah	Sekretaris Dinas Kesehatan
4	Saiful Taqin	Kabid P4PL Dinas Kesehatan
5	Luther Bonggoibo	Kepala Dinas Tenaga Kerja
6	Thomas Wanmang	Tokoh masyarakat Suku Amungme
7	Simon P. Mess	Kabid Pend. SMP Dinas Pendidikan Dasar
8	Pdt. Matheus Adadikam	Ketua GKI di Tanah Papua Klasis Mimika
9	Allo Raffra	Ketua Komisi A DPRD/Mantan Plt. Bupati
10	Markus Makur	Kontributor The Jakarta Post
11	Mgr. John Philip Saklil Pr.	Uskup Timika
12	Tjahjono E.P.	Kontributor Tempo/staf LPMMAK
13	Abdul Kadir	Ketua Panitera Pengadilan Negeri Mimika

\*\*\*